



**RANCANGAN AKTUALISASI
RENCANA AKSI PERUBAHAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

SILALA

**(STRATEGI LAYANAN LANGSUNG DI DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR)
TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK PENATAAN RUANG**

Oleh:

**Oleh : Ir. Rozak Indra Praja, S.T, M.T
NDH : 02
Coach : Dra. Sugiastuti, S.S, M.M
Mentor : H. Ahmad Fuad, S.Si**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN IV
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Aksi Perubahan dengan judul “Strategi Layanan Langsung di Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir: Transformasi Pelayanan Publik Penataan Ruang”. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk implementasi pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, S.Sos., M.M., atas arahan, bimbingan, serta kesempatan yang diberikan sehingga aksi perubahan ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Mentor, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir, H. Ahmad Fuad, S.Si, yang telah memberikan dukungan, masukan, dan pendampingan selama proses penyusunan hingga implementasi aksi perubahan.
3. Coach dari BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Dra. Sugiastuti, S.S., M.M., atas bimbingan, motivasi, serta evaluasi berkelanjutan sehingga aksi perubahan ini dapat berkembang secara sistematis dan terarah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir, rekan-rekan peserta pelatihan, serta semua pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung kelancaran pelaksanaan aksi perubahan ini.

Harapan penulis, laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang Penataan Ruang, serta menjadi referensi dalam upaya mendorong pelayanan yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Palembang, Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Aksi Perubahan	6
C. Manfaat Aksi Perubahan	7
D. Ruang Lingkup	8
E. Analisa Masalah	9
Tabel 1.1 Penetapan Kriteria APKL	10
Tabel 1.2 Definisi APKL	11
Tabel 1.3 Matriks APKL	11
Gambar 1.1 <i>Fishbone Analysis</i>	12
F. Strategi Penyelesaian Masalah	14
Tabel 1.4 Pentahapan Milestone	16
Tabel 1.5 Jadwal Rencana Aksi Perubahan	19
G. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan	19
Tabel 1.5 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi	19
H. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri	20
Tabel 1.7 Proses dan Progres/Hasil dari Pengembangan Diri	21
BAB II	24
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	24
A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan	24
Gambar 2.1 Pelayanan Secara Langsung ke Masyarakat Desa	26
B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan TI)	26
Gambar 2.2 Pemanfaatan Zoom Meeting untuk Memudahkan Komunikasi	27
C. Pengelolaan Tim	28
Gambar 2.3 Rapat dan Diskusi Bersama Tim Efektif	28

BAB III.....	32
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN.....	32
A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Pelayanan	32
Gambar 3.1 Konsultasi dengan Mentor.....	32
Gambar 3.2 SK Tim Efektif.....	34
Gambar 3.3 Melapor pada Pimpinan Dinas	35
Gambar 3.4 Rapat Bersama Tim Efektif	36
Gambar 3.5 SOP Mekanisme Layanan Langsung Penataan Ruang...	38
Gambar 3.6 Sosialisasi SOP Mekanisme Layanan Langsung	40
Gambar 3.7 Lembar Distribusi Dokumen	40
Gambar 3.8 Undangan dan Daftar Hadir Pelatihan	41
Gambar 3.9 Pelatihan SDM secara Internal.....	42
Gambar 3.10 Pemanfaatan Sistem Pengolahan Data Berbasis Cloud untuk Mendukung Aksi Perubahan.....	43
Gambar 3.11 Pemanfaatan Google Form untuk Mendapatkan Feedback secara Langsung	45
B. Manfaat Aksi Perubahan.....	46
Tabel 3.1 Manfaat Aksi Perubahan	46
C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan	49
Tabel 3.2 Kebutuhan Pelatihan Bagi Pihak Terdampak.....	49
Gambar 3.13 Pelatihan Teknis, Pengolahan Data dan Pemahaman Peraturan Perundangan (Sesi 1)	51
Gambar 3.14 Pelatihan Komunikasi dan Koordinasi (Sesi 2)	52
Gambar 3.15 Daftar Hadir Pelatihan Sesi 1 dan Sesi 2	52
BAB IV	53
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN.....	53
A. Tindak Lanjut Kegiatan Jangka Pendek.....	53
Gambar 4.1 Komitmen Tindak lanjut Aksi Perubahan	54
B. Penetapan Target Jangka Menengah dan Jangka Panjang ...	54
BAB V	57
KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN.....	57
A. Rangkuman Pemilihan Mata Pelatihan Pilihan dalam Mendukung Aktualisasi Kepemimpinan PKP	57
Tabel 5.1 Rangkuman Mata Pelatihan Terkait dengan Aksi Perubahan	57

B.	Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja	60
C.	Membangun Kerjasama Tim	61
D.	Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan 62	
BAB VI		64
DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN		64
A.	Penerapan Strategi Komunikasi	64
B.	Publikasi	66
	Gambar 6.1 SOP Mekanisme Layanan Langsung di Upload pada Media Sosial Dinas PUPR	67
C.	Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan	67
	Gambar 6.2 Peta Analisa Stake Holders Sebelum Kegiatan Aksi Perubahan	69
	Rendah Pengaruh	69
	Gambar 6.3 Peta Analisa Stakeholders Setelah Aksi Perubahan Dilaksanakan	69
BAB VII		70
PENGEMBANGAN POTENSI DIRI		70
A.	Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan	70
B.	Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri	73
	Tabel 7.2 Progres Pengembangan Diri	73
BAB VIII		76
PENUTUP		76
A.	Simpulan	76
B.	Saran	78
LAMPIRAN		80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penetapan Kriteria APKL.....	10
Tabel 1.2 Definisi APKL.....	11
Tabel 1.3 Matriks APKL	11
Tabel 1.4 Pentahapan Milestone.....	16
Tabel 1.5 Jadwal Rencana Aksi Perubahan	19
Tabel 1.5 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi	19
Tabel 1.6 Formulir Penilaian Gabungan (Akhir)	20
Tabel 1.7 Proses dan Progres/Hasil dari Pengembangan Diri.....	21
Tabel 3.1 Manfaat Aksi Perubahan	46
Tabel 3.2 Kebutuhan Pelatihan Bagi Pihak Terdampak	49
Tabel 5.1 Rangkuman Mata Pelatihan Terkait dengan Aksi Perubahan ..	57
Tabel 7.1 Formulir Penilaian Akhir Setelah Aksi Perubahan.....	73
Tabel 7.2 Progres Pengembangan Diri	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Fishbone Analysis</i>	12
Gambar 2.1 Pelayanan Secara Langsung ke Masyarakat Desa	26
Gambar 2.2 Pemanfaatan Zoom Meeting untuk Memudahkan Komunikasi	27
Gambar 2.3 Rapat dan Diskusi Bersama Tim Efektif.....	28
Gambar 3.1 Konsultasi dengan Mentor.....	32
Gambar 3.2 SK Tim Efektif	34
Gambar 3.3 Melapor pada Pimpinan Dinas	35
Gambar 3.4 Rapat Bersama Tim Efektif	36
Gambar 3.5 SOP Mekanisme Layanan Langsung Penataan Ruang	38
Gambar 3.6 Sosialisasi SOP Mekanisme Layanan Langsung.....	40
Gambar 3.7 Lembar Distribusi Dokumen	40
Gambar 3.8 Undangan dan Daftar Hadir Pelatihan	41
Gambar 3.9 Pelatihan SDM secara Internal.....	42
Gambar 3.10 Pemanfaatan Sistem Pengolahan Data Berbasis Cloud untuk Mendukung Aksi Perubahan	43
Gambar 3.11 Pemanfaatan Google Form untuk Mendapatkan Feedback secara Langsung	45
Gambar 3.13 Pelatihan Teknis, Pengolahan Data dan Pemahaman Peraturan Perundangan (Sesi 1).....	51
Gambar 3.14 Pelatihan Komunikasi dan Koordinasi (Sesi 2)	52
Gambar 3.15 Daftar Hadir Pelatihan Sesi 1 dan Sesi 2.....	52
Gambar 4.1 Komitmen Tindak lanjut Aksi Perubahan	54
Gambar 6.1 SOP Mekanisme Layanan Langsung di Upload pada Media Sosial Dinas PUPR.....	67
Gambar 6.2 Peta Analisa Stake Holders Sebelum Kegiatan Aksi Perubahan	69
Gambar 6.3 Peta Analisa Stakeholders Setelah Aksi Perubahan Dilaksanakan	69

BAB I

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah salah satu pilar utama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kabupaten OKI. Terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten OKI mencakup wilayah seluas 17.073,75 km², menjadikan peran Dinas PUPR sangat strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten OKI terdiri dari beberapa bidang yang masing-masing memiliki fokus, tanggung jawab, dan mandat khusus dalam menjalankan fungsi dinas. Setiap bidang bertugas untuk mengelola aspek tertentu dari pekerjaan umum dan penataan ruang, mulai dari perencanaan dan desain hingga pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek infrastruktur. Proyek-proyek ini mencakup berbagai jenis infrastruktur, termasuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, sistem drainase, serta bangunan dan fasilitas publik lainnya.

Penataan Ruang dalam konteks Kebijakan Nasional (Asta Cita), Aksi perubahan ini sejalan dengan visi pembangunan nasional, khususnya mengimplementasikan semangat Asta Cita Pemerintah Pusat yang berfokus pada pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu poin kunci Asta Cita adalah **“Membangun Dari Desa dan dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan”**. Asta Cita ini adalah kerangka kerja utama untuk mencapai visi yang lebih besar, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Aksi perubahan ini juga merupakan perwujudan dari Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir periode 2025 – 2030, yang dipimpin oleh Bupati **Muchendi Mahzareki**, Visi pembangunan Kabupaten OKI adalah : **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir Maju Bersama di Bumi Bende Seguguk Tahun 2029.”** Secara khusus, inisiatif ini sangat sejalan dengan salah satu Misi utama, yaitu : **“Mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, cepat, transparan, akuntabel berbasis digital dengan membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk ikut dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.”** Inovasi yang berfokus pada layanan langsung di desa dalam aksi perubahan ini secara konkret mendukung misi tersebut dengan cara mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan membuka ruang partisipasi masyarakat desa dalam tata kelola penataan ruang.

Penataan ruang merupakan aspek fundamental dalam pembangunan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Nomor 6/2023) telah menghapus dan mengubah berbagai peraturan yang bersifat sektoral. Salah satu peraturan yang mengalami perubahan adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU Nomor 6/2023. Selain UU Nomor 6/2023, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP Nomor 21/2021) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Permen ATR Nomor 21/2021). Dalam PP Nomor 21/2021 dan Permen ATR Nomor 21/2021, disebutkan bahwa untuk

dapat mewujudkan tertib tata ruang, perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 43 Permen ATR Nomor 21/2021 dan untuk memberikan pedoman atau acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan penilaian pernyataan mandiri Pelaku UMK.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan ruang berjalan sesuai rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah isu yang menghambat optimalisasi pelayanan publik dan efektivitas kebijakan tata ruang, sesuai dengan membangun dari desa dan dari bawah yang disoroti Asta Cita. Isu-isu tersebut muncul baik dari sisi aksesibilitas pelayanan, ketersediaan data, partisipasi masyarakat, hingga pengendalian pemanfaatan ruang.

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah terbatasnya akses pelayanan publik di tingkat desa. Banyak masyarakat yang berada di wilayah perdesaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan penataan ruang, baik berupa informasi tata ruang, konsultasi teknis, maupun pengurusan perizinan terkait pemanfaatan ruang. Kondisi geografis Kabupaten OKI yang luas dengan banyak desa terpencil menyebabkan layanan publik seringkali terpusat di ibu kota kabupaten. Hal ini menimbulkan kesenjangan akses, sehingga pelayanan terasa jauh dari masyarakat dan berimplikasi pada rendahnya kepuasan publik dan bertentangan dengan semangat Asta Cita untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Isu ini menjadi krusial karena erat kaitannya dengan upaya transformasi pelayanan publik yang menjadi fokus aksi perubahan.

Selain itu, keterbatasan data spasial dan informasi tata ruang yang mutakhir juga menjadi tantangan serius. Data spasial yang ada seringkali belum diperbarui secara berkala, tidak terintegrasi antar

perangkat daerah, serta sulit diakses oleh masyarakat maupun stakeholder lainnya. Akibatnya, proses perencanaan dan evaluasi tata ruang menjadi lambat, bahkan berisiko menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan ruang. Ketidadaan data yang komprehensif dan terbaru membuat kebijakan tata ruang kurang akurat dalam menjawab kebutuhan pembangunan wilayah.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi tata ruang. Masyarakat, terutama yang tinggal di desa, belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tata ruang. Forum konsultasi publik yang ada seringkali bersifat formalitas dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya terserap, sehingga banyak program tata ruang yang kurang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan.

Terakhir, pengendalian alih fungsi lahan yang kurang efektif juga menjadi isu krusial. Fenomena alih fungsi lahan, seperti dari kawasan pertanian produktif atau ruang terbuka hijau menjadi permukiman dan kawasan komersial, masih marak terjadi. Lemahnya koordinasi antar instansi, minimnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga tata ruang berkelanjutan membuat praktik ini sulit dicegah. Dampak jangka panjangnya sangat signifikan, mulai dari berkurangnya ketahanan pangan, terganggunya fungsi ekologis, hingga meningkatnya risiko bencana lingkungan.

Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan kajian komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu penataan ruang di Kabupaten OKI. Hasil penelitian dalam aksi perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas PUPR Kabupaten OKI dalam mengelola penataan ruang, sejalan dengan

agenda nasional untuk mentransformasi pelayanan public demi kesejahteraan rakyat dari tingkat desa.

B. Tujuan Aksi Perubahan

1. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang dari aksi perubahan ini adalah terwujudnya pelayanan publik bidang penataan ruang yang inklusif, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Melalui transformasi layanan langsung ke desa-desa, diharapkan dapat tercipta tata kelola ruang yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.

2. Tujuan Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, aksi perubahan ini bertujuan untuk membangun sistem pelayanan yang adaptif dengan memperkuat kapasitas aparatur, mengembangkan mekanisme layanan keliling, serta membentuk pola koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan demikian, aksesibilitas layanan dapat meningkat dan jangkauan pelayanan publik bidang penataan ruang dapat diperluas ke seluruh desa.

3. Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek dari program ini adalah menghadirkan layanan penataan ruang secara langsung ke desa-desa sebagai bentuk solusi cepat atas terbatasnya akses pelayanan. Program percontohan di beberapa desa menjadi langkah awal dalam menguji efektivitas metode pelayanan jemput bola, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bidang Penataan Ruang.

C. Manfaat Aksi Perubahan

1. Manfaat Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir akan merasakan manfaat berupa peningkatan kualitas tata ruang wilayah yang lebih tertib, berkelanjutan, serta minim konflik pemanfaatan ruang. Masyarakat akan lebih mudah berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengendalian tata ruang, sehingga tercipta tata kelola ruang yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Manfaat jangka Panjang diukur dari :

- Kuantitatif & Kualitatif : Peningkatan persentase ketaatan pemanfaatan ruang ditingkat desa (Peningkatan desa yang terdata patuh) yang menunjukkan keberlanjutan tata ruang yang lebih tertib.
- Ekonomi (Estimasi) : Penurunan potensi kerugian ekonomi akibat konflik pemanfaatan ruang berkat peningkatan partisipasi dan transparansi.

2. Manfaat Jangka Menengah

Manfaat jangka menengah dari aksi perubahan ini adalah meningkatnya keterjangkauan layanan penataan ruang bagi masyarakat desa. Masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, maupun layanan perizinan tanpa harus menempuh jarak jauh ke ibu kota kabupaten. Selain itu, aparat desa juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aturan penataan ruang, sehingga dapat menjadi mitra aktif pemerintah dalam pengawasan pemanfaatan ruang.

Manfaat jangka menengah diukur dari :

- Kuantitatif : Peningkatan jangkauan pelayanan, seperti bertambahnya desa yang terlayani minimal 50% dari total desa di Kabupaten OKI dalam kurun waktu 1 tahun

- Kualitatif : Peningkatan pemahaman aparat desa mengenai regulasi penataan ruang setelah mendapatkan sosialisasi dan pendampingan.
- Ekonomi (Estimasi) : Pengurangan biaya transportasi dan waktu akibat layanan keliling/jemput bola.

3. Manfaat Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, manfaat yang diperoleh adalah adanya solusi cepat bagi masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan penataan ruang secara langsung di wilayahnya. Kehadiran tim pelayanan di desa akan mempermudah akses masyarakat, mengurangi biaya transportasi, serta memberikan kepastian pelayanan yang lebih cepat dan efisien.

Manfaat jangka pendek diukur dari :

- Kuantitatif : Peningkatan jumlah layanan tatap muka (informasi, konsultasi, dan fasilitasi perizinan) yang dilaksanakan di desa (target : 10 kali kegiatan pelayanan langsung/jemput bola didesa per periode pelayanan)
- Kualitatif : Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Bidang Penataan Ruang (target : Setiap layanan di desa)
- Ekonomi (Estimasi) : Estimasi penghematan waktu masyarakat per layanan (penghematan waktu minimal 2 jam) karena tidak perlu melakukan perjalanan ke ibu kota kabupaten.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup aksi perubahan ini mencakup penyediaan layanan penataan ruang yang meliputi pemberian informasi tata ruang, konsultasi teknis, fasilitasi perizinan pemanfaatan ruang, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya tata ruang yang

berkelanjutan. Layanan dilakukan melalui mekanisme jemput bola dengan mendatangi desa-desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain itu, ruang lingkup juga mencakup koordinasi dengan pemerintah desa, penyusunan SOP layanan keliling, penggunaan sarana komunikasi publik yang efektif, serta evaluasi terhadap kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

E. Analisa Masalah

1. Isu-isu yang Ada di Bidang Penataan Ruang DPUPR OKI

Beberapa isu permasalahan yang terjadi pada Bidang Penataan Ruang DPUPR OKI yaitu:

- a. Akses Pelayanan Publik yang Terbatas di Tingkat Desa.
Banyak masyarakat desa di Kabupaten OKI mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan bidang penataan ruang, baik terkait informasi tata ruang, perizinan pemanfaatan ruang, maupun konsultasi teknis. Hal ini menyebabkan rendahnya keterjangkauan layanan publik dan tingginya biaya waktu serta transportasi masyarakat desa. (Isu ini selaras dengan judul aksi perubahan).
- b. Keterbatasan Data Spasial dan Informasi Tata Ruang yang Mutakhir.
Pengambilan keputusan sering terkendala karena data spasial yang tersedia kurang lengkap, tidak terintegrasi, dan belum diperbarui secara berkala. Kondisi ini berimplikasi pada lambatnya proses evaluasi dan perencanaan tata ruang serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan ruang.
- c. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Evaluasi Tata Ruang.
Masyarakat, terutama di tingkat desa, belum dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan dan evaluasi

penataan ruang. Akibatnya, banyak usulan yang tidak tersampaikan dengan baik, sehingga kebijakan penataan ruang seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

d. **Pengendalian Alih Fungsi Lahan yang Kurang Efektif.**

Masih sering terjadi alih fungsi lahan tanpa pengendalian yang ketat, misalnya dari lahan pertanian produktif atau RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi kawasan permukiman atau kegiatan ekonomi. Kelemahan pada aspek pengawasan dan koordinasi lintas sektor membuat dampaknya signifikan terhadap lingkungan dan keseimbangan tata ruang.

2. **Penapisan Isu Menggunakan Tabel APKL**

Setelah melakukan inventarisir terhadap isu-isu yang ada di Bidang Penataan Ruang DPUPR Kab. OKI, maka selanjutnya penulis menganalisis isu yang diangkat dengan menggunakan metode USG, yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Penetapan Kriteria APKL

Bobot Nilai	Keterangan
5	Sangat Kuat
4	Kuat
3	Sedang
2	Kurang
1	Sangat Kurang

Sumber: Data yang diolah, 2025

Tabel 1.2 Definisi APKL

Kriteria	Keterangan
Aktual	Aktual terjadi dan menjadi topik pembahasan
Problematis	Kompleksitas isu menuntut perlu segera ditindaklanjuti
Kekhalayakan	Isu menyangkut hajat hidup orang banyak
Layak	Logis, realistis, dan relevan

Sumber: Data yang diolah, 2025

Setelah mengetahui metoder APKL melalui penjelasan tabel di atas, selanjutnya dilakukan Analisa terhadap isu yang terkait menggunakan tabel APKL yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3 Matriks APKL

No	Isu	A	P	K	L	Jml	Peringkat
1	Akses Pelayanan Publik yang Terbatas di Tingkat Desa	5	5	5	5	20	1
2	Keterbatasan Data Spasial dan Informasi Tata Ruang yang Mutakhir	4	4	4	4	16	3
3	Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Evaluasi Tata Ruang	5	5	5	4	19	2
4	Pengendalian Alih Fungsi Lahan yang Kurang Efektif	4	4	3	3	14	4

Sumber: Data yang diolah, 2025

3. Analisa Sumber Masalah Menggunakan Analisa *Fish Bone*

Melalui Analisa isu menggunakan matriks APKL di bagian sebelumnya, penulis memilih isu **Akses Pelayanan Publik yang Terbatas di Tingkat Desa** sebagai Isu Utama (*Core Issue*) yang perlu segera ditindak lanjuti dan dianalisa lebih lanjut menggunakan *Fishbone Analysis*.



Gambar 1.1 Fishbone Analysis

Dalam konteks isu **Akses Pelayanan Publik yang Terbatas di Tingkat Desa**, kita dapat menggunakan kategori Man, Methode, Material, dan Machine untuk membagi penyebab-penyebab utama. Berikut adalah hasil analisis menggunakan kategori tersebut:

1. Man (Orang)

- Jumlah pegawai yang terbatas sehingga pelayanan lebih terkonsentrasi di kantor kabupaten.
- Kompetensi aparatur dalam memberikan layanan keliling masih rendah.
- Minimnya tenaga teknis yang ditempatkan di wilayah kecamatan/desa.

2. Methode (Metode)

- Mekanisme pelayanan masih berpusat (sentralisasi) di kantor dinas.
- Belum ada SOP pelayanan keliling/jemput bola ke desa.
- Proses administrasi layanan masih manual dan memakan waktu lama.

3. Material (Material)

- Keterbatasan fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional, perangkat IT mobile, dan jaringan internet.
- Belum tersedia media informasi desa (papan pengumuman digital, aplikasi layanan) yang terhubung langsung dengan dinas.
- Sarana komunikasi publik di desa masih minim.

4. Machine (Mesin)

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masih terbatas.
- Belum ada sistem layanan online yang terintegrasi dengan pemerintah desa.
- Infrastruktur jaringan internet di beberapa desa masih lemah atau tidak stabil.

4. Dampak Masalah

Terbatasnya akses pelayanan publik bidang penataan ruang di tingkat desa menimbulkan berbagai dampak yang signifikan, baik bagi masyarakat maupun bagi kinerja pemerintah daerah. Masyarakat desa yang jauh dari pusat pelayanan harus menempuh jarak yang panjang dan mengeluarkan biaya transportasi tambahan hanya untuk mengurus administrasi atau mendapatkan informasi tata ruang. Hal ini tidak hanya mengurangi efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan karena akses pelayanan lebih mudah dinikmati masyarakat yang tinggal di sekitar ibu kota

kabupaten. Dari sisi sosial, kondisi ini memperlebar kesenjangan antara masyarakat desa dan perkotaan dalam hal kemudahan memperoleh pelayanan publik. Sementara itu, bagi pemerintah daerah, keterbatasan akses ini membuat tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengendalian tata ruang menjadi rendah, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang representatif terhadap kebutuhan lokal. Akibatnya, aspirasi masyarakat desa tidak sepenuhnya terakomodasi, yang dapat memicu ketidakpuasan dan melemahkan legitimasi kebijakan tata ruang. Selain itu, rendahnya jangkauan pelayanan menyebabkan lambatnya proses penertiban pemanfaatan ruang di wilayah perdesaan, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan praktik alih fungsi lahan ilegal maupun pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat terciptanya tata kelola ruang yang tertib, partisipatif, dan berkelanjutan, serta mengurangi efektivitas pembangunan daerah secara keseluruhan.

F. Strategi Penyelesaian Masalah

1. Terobosan Inovasi

Untuk menjawab tantangan terbatasnya akses pelayanan publik bidang penataan ruang di tingkat desa, diperlukan terobosan inovatif yang mampu menghadirkan layanan lebih dekat, cepat, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah strategis adalah dengan membuka pelayanan terpadu secara langsung ke desa-desa melalui mekanisme jemput bola. Kehadiran aparatur dinas di desa-desa akan memberikan pengalaman pelayanan yang lebih inklusif, karena masyarakat dapat mengakses informasi tata ruang, konsultasi, hingga pengurusan administrasi tanpa harus datang ke ibu kota kabupaten. Selain itu, pelayanan langsung ini juga menciptakan ruang dialog tatap muka

yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menjadi media untuk menyerap aspirasi lokal secara lebih komprehensif.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi bagian penting dari transformasi pelayanan. Penggunaan aplikasi Zoom Meeting dapat menjadi sarana dialog interaktif antara pemerintah dengan masyarakat maupun stakeholder lain, seperti pemerintah desa, tokoh adat, dan akademisi. Melalui forum virtual ini, masyarakat desa yang sulit menjangkau kantor dinas tetap bisa berpartisipasi dalam proses perencanaan dan evaluasi tata ruang. Inovasi ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mendorong transparansi kebijakan karena semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan cara ini, partisipasi masyarakat dapat meningkat tanpa terkendala oleh jarak geografis.

Selain itu, penguatan layanan berbasis data dapat dilakukan dengan memanfaatkan Google Form dan Google Spreadsheet sebagai instrumen pengumpulan dan pengelolaan informasi dari masyarakat. Masyarakat desa dapat dengan mudah menyampaikan usulan, keluhan, atau pertanyaan melalui formulir digital yang sederhana. Data yang masuk secara otomatis akan tercatat dalam spreadsheet, sehingga memudahkan aparatur dalam melakukan analisis dan tindak lanjut. Inovasi ini semakin efektif apabila disertai dengan sosialisasi yang masif, baik melalui perangkat desa, media sosial, maupun kegiatan pelayanan langsung. Dengan demikian, masyarakat akan terbiasa menggunakan kanal digital untuk berinteraksi dengan pemerintah, sementara pemerintah memperoleh data yang lebih sistematis, akurat, dan real-time sebagai dasar perumusan kebijakan tata ruang.

Kombinasi antara layanan langsung ke desa, forum daring melalui Zoom, dan instrumen digital berbasis Google Form serta Spreadsheet menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih fleksibel dan responsif. Inovasi-inovasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah keterbatasan akses, tetapi juga membuka peluang bagi terwujudnya tata kelola penataan ruang yang lebih modern, transparan, dan partisipatif. Pada akhirnya, langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat peran Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Milestone Aksi Perubahan

Tabel 1.4 Pentahapan Milestone

Jangka Pendek				
No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Waktu
A. TAHAP PERSIAPAN				
1.	Melakukan konsultasi dengan Mentor	a. Menemui dan menghadap mentor b. Meminta dukungan mentor c. Meminta arahan mentor	1. Surat Dukungan 2. Laporan hasil konsultasi 3. Foto/video	Minggu ke-3 Bulan Oktober
2.	Melapor kepada Atasan Langsung (Mentor) dan Kepala Dinas terkait implementasi program aksi perubahan yang akan dilaksanakan.	a. Menemui dan menghadap atasan (Kepala Dinas) b. Meminta arahan pelaksanaan aksi perubahan c. Menyampaikan gagasan aksi perubahan beserta usulan tim aksi perubahan	1. Notulen hasil konsultasi 2. SK Tim Efektif 3. Foto/video	Minggu ke-4 Bulan Oktober

		d. Meminta persetujuan SK Tim Efektif		
3.	Melaksanakan rapat persiapan aksi perubahan dengan tim efektif	a. Menyiapkan bahan rapat, undangan dan daftar hadir b. Melaksanakan rapat dengan tim efektif c. Menyampaikan SK tim efektif dan membagi tugas	1. Surat Undangan Rapat 2. Daftar Hadir 3. Notulen Rapat 4. Foto/Video	Minggu ke-4 Bulan Oktober
B. TAHAP PELAKSANAAN				
4.	Menyiapkan dokumen berupa SOP	a. Menyusun dokumen-dokumen kebutuhan program aksi perubahan seperti, SOP b. Menyampaikan dokumen tersebut kepada pimpinan untuk di sahkan c. Mendistribusikan serta melaksanakan sosialisasi ke setiap bidang	1. Dokumen SOP 2. Lembar serah terima (tanda bukti) distribusi dokumen 3. Foto/video	Minggu ke-1 Bulan November
5.	Meng-implementasi-kan SOP	a. Melakukan uji coba SOP b. Mengunggah SOP ke media sosial Dinas c. Memberikan lembar form penilaian kepada pengguna	1. Dokumen SOP 2. Bukti form yang telah diisi 3. Video uji coba 4. Foto kegiatan	Minggu ke-1 Bulan November
6	Memberikan pelatihan SDM secara Internal	a. Membuat surat undangan dan daftar hadir pelatihan	1. Surat undangan pelatihan	Minggu ke-2 Bulan November

		b. Melaksanakan pelatihan bagi yang terlibat di dalam proses aksi perubahan c. Membagikan modul yang baru diterapkan.	2. Daftar hadir pelatihan 3. Modul Pelatihan dan tanda terima 4. Laporan hasil pelatihan 5. Foto/Video	
7	Melakukan update data berbasis cloud	a. Memanfaatkan fitur google spreadsheet untuk memudahkan setiap tim yang terlibat dalam melihat progress dan update data. b. Membuat grup WhatsApp untuk koordinasi internal agar memudahkan komunikasi c. Melakukan check ulang (<i>updating</i>)	1. Google Spreadsheet 2. Tangkapan layar group Whatsapp 3. Foto/video	Minggu ke-2 Bulan November
C. TAHAP EVALUASI				
8	Mengumpulkan feedback dari setiap stakeholder yang terlibat	a. Menyebarkan form penilaian melalui google form untuk meminta umpan balik atau feedback dari penerapan prosedur yang baru b. Melakukan pendataan dan analisa hasil dari feedback yang telah dikumpulkan c. Mengumpulkan hasil feedback	1. Google form 2. Rekap data feedback 3. Laporan hasil 4. Foto/video	Minggu ke-3 dan 4 Bulan November

Tabel 1.5 Jadwal Rencana Aksi Perubahan

No	Kegiatan	Oktober				November				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Melakukan konsultasi dengan Mentor												
2	Melapor kepada Atasan Langsung (Mentor) dan Kepala Dinas terkait implementasi program aksi perubahan yang akan dilaksanakan												
3	Melaksanakan rapat persiapan aksi perubahan dengan tim efektif												
4	Menyiapkan dokumen berupa SOP												
5	Mengimplementasikan SOP												
6	Pelatihan SDM secara internal												
7	Melakukan update data berbasis cloud dan Percepatan Komunikasi-koordinasi												
8	Mengumpulkan feedback dari setiap stakeholder yang terlibat												

G. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Berikut adalah beberapa konsekuensi kebutuhan kompetensi baru dan program pelatihan yang relevan:

Tabel 1.5 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi

No	Pihak Terdampak	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan
1	Pegawai di seluruh bidang DPUPR Kab. OKI	Kemampuan menggunakan Teknologi Informasi seperti Google Form untuk pengumpulan data, serta	In house Training dasar dan lanjutan dalam penggunaan aplikasi berbasis web, seperti Google Form, Google Sheets, serta aplikasi lain yang terkait

		System pendataan komputerisasi	dengan pengolahan dan analisis data
2	Pegawai bagian pengolahan data di seluruh bidang DPUPR Kab. OKI	Manajemen Data dan Pengolahan Informasi	In House Training pengelolaan database, verifikasi dan validasi data, serta analisis data
3	Pegawai di seluruh bidang DPUPR Kab. OKI	Komunikasi Efektif dan Koordinasi Digital	In House Training yang mencakup penggunaan platform komunikasi internal (email, video conference) serta komunikasi dengan masyarakat melalui platform daring.

H. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

1. Pemetaan Hasil Penilaian

Tabel 1.6 Formulir Penilaian Gabungan (Akhir)

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: Ir. Rozak Indra Praja, ST, MT	Nama Mentor	: Ahmad Fuad, S.Si
NIP	: 197910112008011004	NIP:	: 197511212010011007
Jabatan	: Penata Ruang Muda	Jabatan	: Kepala Bidang Penataan Ruang
Instansi	: DPUPR Kab. OKI	Instansi	: DPUPR Kab. OKI
Program	: PKP IV Tahun 2025		

Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	8.00	8.00	8.00	8.00	Baik
Mentor	8.00	8.40	8.00	8.13	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8.00	8.28	8.00	8.09	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8.09
Kualifikasi:
Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

2. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Tabel 1.7 Proses dan Progres/Hasil dari Pengembangan Diri

No	Komponen/sub Komponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan / Tahapan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
				Rencana	Realisasi	
1.	Tanggung Jawab	Tingkatkan rasa kepemilikan atas tugas dan tanggung jawab individu melalui penerapan target yang jelas dan penilaian kinerja berkala.	Menerapkan SOP evaluasi pemanfaatan ruang bersama tim efektif			
2.	Komitmen	Perkuat motivasi peserta dengan memperjelas tujuan jangka panjang aksi perubahan.	Memimpin rapat tim efektif dan menghadap pimpinan terkait komitmen jangka panjang aksi perubahan			
3.	Konsistensi	Dorong peserta untuk menjaga rutinitas dalam mencapai target melalui pencatatan kemajuan harian atau mingguan.	Memimpin tim efektif menjalankan SOP pemanfaatan ruang			
4.	Kerjasama Internal	Adakan workshop	Membentuk tim efektif dan			

		kolaboratif dan permainan tim untuk memperkuat koordinasi antar anggota tim.	menjadi pimpinan dari tim yang berkomitmen menjalankan kegiatan aksi perubahan			
5.	Kerjasama Eksternal	Berikan pelatihan komunikasi eksternal dan negosiasi untuk memperkuat hubungan dengan pihak luar, seperti stakeholder dan mitra kerja.	Berkomunikasi dengan masyarakat dan kepala desa untuk mensosialisasikan kegiatan aksi perubahan			
6.	Komunikasi	Kembangkan kemampuan komunikasi melalui pelatihan presentasi, public speaking, dan pengelolaan konflik.	Memimpin rapat dan menjadi pemateri untuk beberapa program pelatihan			
7.	Pelayanan Publik	Tingkatkan pemahaman tentang pelayanan prima melalui pelatihan customer service untuk ASN.	Menyediakan fitur formulir online yang dapat diakses oleh masyarakat luas			
8.	Adaptabilitas	Latih peserta untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan	Beradaptasi dengan baik bersama tim yang baru dibentuk untuk			

		melalui simulasi skenario kerja dinamis.	menerapkan kegiatan aksi perubahan			
9.	Pengembangan orang lain	Sediakan program mentoring atau coaching bagi peserta untuk meningkatkan keterampilan membimbing rekan kerja.	Membuka 2 sesi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teknis bagi pegawai di PUPR khususnya di bidang Penataan Ruang			
10.	Orientasi pada hasil	Tetapkan sistem pencapaian yang fokus pada hasil konkret dan terukur.	Membuka kritik dan saran terhadap penilaian langsung dari berbagai pihak untuk melihat hasil yang lebih objektif			
11.	Inisiatif	Berikan ruang bagi peserta untuk mengusulkan ide-ide baru melalui sesi brainstorming atau kompetisi ide inovasi.	Mengusulkan 2 sesi pelatihan yang meningkatkan kompetensi pegawai kepada kepala bidang			

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan

Integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik, khususnya melalui strategi layanan langsung ke desa pada sektor Penataan Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, integritas menjadi prinsip dasar bagi ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik secara profesional, efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks implementasi pelayanan penataan ruang berbasis desa, integritas tidak hanya dipahami sebagai karakter personal, melainkan juga komitmen kolektif organisasi untuk memberikan pelayanan yang jujur, transparan, dan berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat desa.

Integritas dalam penyelenggaraan layanan langsung ke desa dapat diukur melalui beberapa indikator penting, seperti kejujuran dalam verifikasi data tata ruang, kepatuhan ASN terhadap regulasi perencanaan wilayah, tanggung jawab atas keputusan teknis, dan konsistensi dalam melayani masyarakat secara adil tanpa diskriminasi. Transparansi dan kejujuran menjadi elemen vital ketika proses peninjauan dan perencanaan penataan ruang dilakukan di tingkat desa, karena berhubungan langsung dengan penyediaan data faktual, dokumentasi lapangan, serta pemenuhan persyaratan administratif yang berdampak pada keputusan tata ruang jangka panjang.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang

Pembangunan Integritas ASN, nilai integritas menuntut setiap pegawai untuk berperilaku konsisten, taat asas, serta menjaga etika sesuai norma kelembagaan. Dalam strategi layanan langsung ke desa, nilai tersebut diwujudkan melalui sikap responsif, empatik, komunikatif, dan profesional ketika berhadapan dengan masyarakat, pemerintah desa, maupun pemangku kepentingan lainnya. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dibangun melalui praktik pelayanan tanpa gratifikasi, tanpa rekayasa dokumen, serta tanpa adanya conflict of interest dalam penentuan kebijakan tata ruang.

Guna memastikan transformasi pelayanan berbasis desa berjalan efektif, Dinas PUPR Kabupaten OKI konsisten melakukan penguatan tata kelola berbasis integritas melalui beberapa langkah strategis, yaitu: edukasi dan sosialisasi etika aparatur, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengawasan internal dan audit lapangan, peningkatan kanal transparansi publik, serta pemberlakuan mekanisme reward and punishment. Dengan adanya langkah tersebut, pelayanan tatap muka langsung di desa tidak hanya berorientasi pada percepatan layanan, namun juga menjunjung tinggi nilai keadilan, keterbukaan, serta pertanggungjawaban publik.

Selain itu, peningkatan sistem komunikasi publik dan akses informasi desa menjadi bagian dari transformasi pelayanan, diantaranya melalui penggunaan media informasi publik, pemanfaatan aplikasi pengaduan, integrasi data desa berbasis digital, serta publikasi jadwal layanan dan output kegiatan yang dapat dipantau langsung oleh masyarakat. Langkah ini bertujuan menciptakan partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan tata ruang serta meminimalisir potensi kesalahan dan ketidaksesuaian fakta lapangan.



Gambar 2.1 Pelayanan Secara Langsung ke Masyarakat Desa

Melalui penegakan integritas dalam implementasi Strategi Layanan Langsung di Desa Kabupaten OKI, Dinas PUPR memiliki harapan besar bahwa transformasi pelayanan publik penataan ruang dapat berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan ASN yang berintegritas tinggi, pelaksanaan tugas bukan hanya menjadi rutinitas administratif, melainkan bagian dari komitmen pelayanan publik yang jujur, amanah, dan membawa manfaat nyata bagi pembangunan wilayah desa yang berkelanjutan.

B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan TI)

Di Dalam mendukung transformasi pelayanan publik bidang penataan ruang, pemanfaatan teknologi informasi (IT) menjadi strategi penting untuk menjawab tantangan keterbatasan akses di tingkat desa. Teknologi memungkinkan proses komunikasi, konsultasi, serta pengumpulan data dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan inklusif, tanpa terhambat oleh jarak geografis yang luas di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Salah satu bentuk pemanfaatan IT adalah melalui penggunaan aplikasi Zoom Meeting sebagai sarana dialog interaktif antara pemerintah dengan masyarakat maupun stakeholder lainnya. Melalui

forum daring ini, masyarakat desa, camat, perangkat desa, hingga tokoh adat dapat terlibat aktif dalam diskusi mengenai pemanfaatan ruang tanpa harus hadir secara fisik di kantor dinas. Penggunaan Zoom Meeting tidak hanya meminimalisir hambatan transportasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap masukan dapat terdokumentasi secara baik serta menjadi bagian dari proses perencanaan dan evaluasi kebijakan tata ruang.

Selain itu, pemanfaatan Google Form dan Google Spreadsheet juga menjadi terobosan dalam memperkuat sistem pelayanan berbasis data. Google Form digunakan sebagai instrumen pengumpulan usulan, keluhan, maupun pertanyaan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah melalui gawai sederhana. Data yang masuk secara otomatis terhimpun dalam Google Spreadsheet, sehingga memudahkan aparatur dinas dalam melakukan analisis, klasifikasi, dan tindak lanjut. Inovasi ini semakin efektif apabila disertai sosialisasi yang intensif, baik melalui perangkat desa, media sosial, maupun saat kegiatan layanan langsung ke desa.



Gambar 2.2 Pemanfaatan Zoom Meeting untuk Memudahkan Komunikasi

Pemanfaatan IT melalui Zoom Meeting, Google Form, dan Google Spreadsheet menjadi wujud modernisasi pelayanan publik yang

tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola ruang. Integrasi teknologi dengan pelayanan langsung di lapangan menciptakan sinergi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara cepat sekaligus mendukung prinsip transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik bidang penataan ruang.

C. Pengelolaan Tim

Sebagaimana makna kelompok atau tim dalam konteks luas, tim di Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) juga membangun hubungan kerja yang harmonis, kolaboratif, serta saling mendukung dalam rangka mendorong terjadinya perubahan, pertumbuhan, dan peningkatan kinerja baik secara individu maupun organisasi. Setiap anggota tim memiliki kompetensi yang saling melengkapi dan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan bersama melalui prinsip kerja sama, responsibilitas, dan profesionalisme. Kolaborasi yang solid antaranggota tim menjadi kunci dalam mewujudkan visi dan misi penataan ruang yang tertib, terarah, dan berkelanjutan.



Gambar 2.3 Rapat dan Diskusi Bersama Tim Efektif

Keberhasilan tim diukur melalui kemampuannya menyelesaikan target dan tugas yang telah direncanakan secara tepat waktu, efektif, dan sesuai standar teknis yang berlaku. Dalam konteks ini, tim yang efektif adalah tim yang mampu bekerja secara optimal dengan menghasilkan output dan outcome yang relevan dengan kebutuhan pengendalian dan perencanaan penataan ruang. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemimpin kegiatan (project leader) menerapkan prinsip kepemimpinan partisipatif dengan cara menggerakkan, melibatkan, dan memotivasi seluruh anggota tim. Adapun langkah pengelolaan tim dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Perencanaan Kegiatan dengan Melibatkan Seluruh Tim

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan dan rencana kerja penataan ruang secara sistematis, termasuk melakukan identifikasi serta pemetaan sumber daya yang tersedia.
- b. Mengorganisasikan anggota tim melalui optimalisasi kapasitas, kompetensi, dan peran masing-masing secara efisien guna mendukung kelancaran proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pemanfaatan ruang.
- c. Melaksanakan sosialisasi pembagian tugas secara terstruktur agar setiap anggota memahami peran, fungsi, serta tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan penataan ruang.

2. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Menggerakkan tim sesuai fungsi, kapasitas keahlian, serta penugasan yang relevan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan layanan langsung ke desa, terutama terkait proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Menjaga koordinasi yang efektif antaranggota tim dalam pelaksanaan layanan langsung ke desa, khususnya pada

kegiatan yang saling berkaitan seperti survei lapangan, dialog masyarakat, pengolahan dan verifikasi data desa, serta validasi teknis dokumen penataan ruang agar proses kerja berlangsung terpadu, transparan, dan akuntabel.

3. Monitoring dan Evaluasi

- a. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan layanan langsung ke desa untuk meninjau perkembangan kegiatan, memastikan kesesuaian dengan rencana kerja, serta menjaga kualitas proses pelayanan penataan ruang.
- b. Mengidentifikasi kendala atau potensi permasalahan di lapangan serta menyusun alternatif solusi melalui forum diskusi bersama, termasuk melakukan penyesuaian atau koreksi kebijakan teknis apabila diperlukan guna menjamin efektivitas dan ketepatan layanan penataan ruang di tingkat desa.

Pendekatan ini sangat relevan diterapkan dalam pengelolaan tim di Bidang Penataan Ruang DPUPR OKI, dimana setiap tahapan kerja tidak hanya berfokus pada hasil tetapi juga proses, sinergi, dan kualitas kontribusi. Pada tahap perencanaan, project leader harus memastikan bahwa kebutuhan dan potensi anggota tim dipetakan secara tepat sehingga dapat dimaksimalkan untuk mendukung pelaksanaan program. Pembagian tugas berbasis kompetensi menjadi strategi penting agar setiap pekerjaan ditangani oleh personel yang memiliki keahlian dan pengalaman sesuai bidangnya. Misalnya, anggota dengan kemampuan dalam pemetaan dan analisis data, sementara anggota dengan kompetensi administratif lebih optimal menangani proses dokumentasi dan layanan administrasi.

Setelah struktur dan peran ditetapkan, kepemimpinan project leader berfungsi memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai tujuan, serta memastikan seluruh anggota memahami pentingnya

program perubahan yang sedang dilakukan. Pemimpin juga harus mampu memupuk motivasi, memberikan apresiasi, dan melakukan komunikasi yang terbuka untuk menjaga komitmen tim. Diskusi rutin, koordinasi aktif, serta evaluasi yang transparan menjadi bagian penting dalam menjaga soliditas tim dan mendorong rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan layanan penataan ruang.

Melalui pendekatan tersebut, pengelolaan tim di Bidang Penataan Ruang DPUPR Kabupaten OKI dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik. Penguatan kompetensi anggota, pembagian tugas yang tepat, pengorganisasian yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu menginspirasi diharapkan mampu mendorong keberhasilan implementasi aksi perubahan menuju tata kelola penataan ruang yang lebih profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Pelayanan

1. Konsultasi dengan Mentor

Pada minggu ke-3 bulan Oktober 2025, project leader dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan kegiatan konsultasi dengan mentor sebagai langkah strategis untuk memperkuat arah, kesesuaian, dan implementasi. Kegiatan konsultasi ini diawali dengan menemui serta berdiskusi langsung dengan mentor.



Gambar 3.1 Konsultasi dengan Mentor

Dalam sesi konsultasi tersebut, project leader meminta dukungan, arahan, dan masukan mendalam dari mentor, baik terkait aspek teknis maupun strategi pelaksanaan, agar setiap tahapan program dapat dijalankan secara sistematis, efektif,

serta sesuai regulasi dan standar profesi penataan ruang. Arahan mentor menjadi pedoman strategis bagi project leader dalam melakukan penyesuaian langkah, menyempurnakan metode pelaksanaan, serta memperkuat efektivitas capaian program.

Hasil dari konsultasi ini menghasilkan beberapa output penting, yaitu terbitnya Surat Dukungan sebagai bentuk persetujuan dan legitimasi formal dari mentor terhadap program aksi perubahan yang diusulkan, serta dokumentasi kegiatan melalui foto atau video sebagai bukti autentik proses konsultasi. Dokumentasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai bagian dari lampiran, referensi, dan bahan evaluasi yang relevan dalam pelaksanaan maupun penilaian keberlanjutan program di masa mendatang.

2. Melapor pada Atasan dan Membentuk Tim Kerja

Pada minggu ke-4 bulan Oktober 2025, project leader dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan kegiatan untuk membentuk tim kerja dalam rangka mendukung implementasi program aksi perubahan yang telah dirancang. Kegiatan ini diawali melalui pelaksanaan rapat koordinasi yang bertujuan menyamakan persepsi, membangun komitmen, serta merumuskan langkah-langkah pelaksanaan program termasuk penjelasan mengenai tanggung jawab yang akan diemban oleh masing-masing anggota tim.



Gambar 3.2 SK Tim Efektif

Dalam koordinasi bersama pimpinan tersebut, project leader menetapkan struktur tim pelaksana program aksi perubahan yang terdiri dari personel kunci yang memiliki kompetensi relevan serta peran strategis dalam mendukung tercapainya target yang telah direncanakan. Selain itu, setiap anggota tim diberikan penjelasan mengenai tugas pokok, ruang lingkup kerja, serta timeline pelaksanaan yang harus dijalankan secara disiplin untuk memastikan capaian yang optimal dan terukur.



Gambar 3.3 Melapor pada Pimpinan Dinas

Sebagai hasil dari kegiatan ini, sejumlah output telah disusun dan terdokumentasikan dengan baik, berupa undangan rapat yang memuat agenda dan daftar peserta, daftar hadir sebagai bukti keikutsertaan, notulen rapat yang merangkum poin-poin hasil pembahasan, serta dokumentasi foto sebagai bukti pelaksanaan kegiatan koordinasi. Seluruh output tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi berkelanjutan dalam pelaksanaan program aksi perubahan pada periode berikutnya.

3. Melaksanakan Rapat Persiapan Aksi Perubahan

Pada minggu ke-IV bulan Oktober 2025, dilaksanakan kegiatan rapat persiapan aksi perubahan bersama tim efektif yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan penataan ruang di Dinas PUPR Kabupaten OKI. Pada tahap ini, dilakukan serangkaian persiapan berupa penyusunan bahan rapat, pengiriman undangan kepada peserta, serta penyediaan daftar hadir untuk memastikan peserta yang terlibat tercatat dengan baik. Rapat kemudian dilaksanakan secara efektif dan terarah guna menyamakan langkah serta memperkuat

koordinasi internal, khususnya terkait strategi, mekanisme, dan alur kerja program agar dapat berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.



Gambar 3.4 Rapat Bersama Tim Efektif

Selain itu, kegiatan pada milestone ini juga mencakup penyampaian Surat Keputusan (SK) tim efektif sebagai dasar legal formal bagi anggota tim untuk menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Melalui penyampaian SK tersebut, dilakukan pembagian peran dan tanggung jawab secara jelas agar setiap anggota memiliki fokus kerja sesuai kompetensi dan kontribusinya. Untuk mendukung akuntabilitas serta pelaporan kegiatan, disusun dokumen pendukung berupa surat undangan rapat, daftar hadir, notulen rapat, serta dokumentasi berupa foto atau video. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan internal sebelum memasuki tahapan implementasi langsung kepada masyarakat.

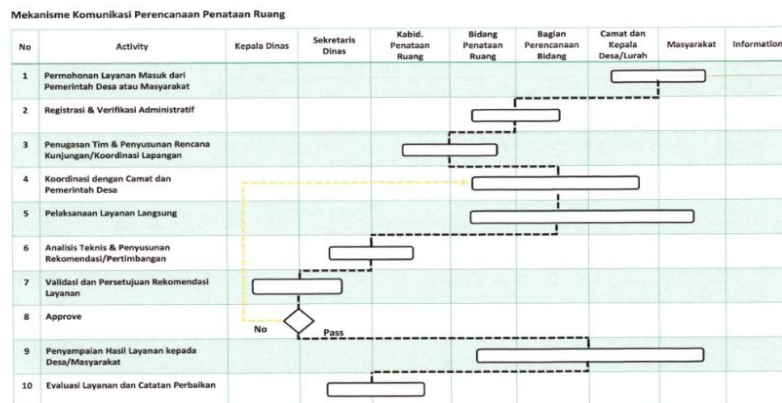
4. Menyiapkan Dokumen SOP

Pada minggu ke-1 bulan November 2025, project leader dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan kegiatan penyusunan serta persiapan dokumen-dokumen penting, termasuk Standar

Operasional Prosedur (SOP), yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi program aksi perubahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional, teknis, serta prosedural program dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan sesuai standar pelayanan di bidang penataan ruang.

Proses penyusunan diawali dengan pembuatan dokumen kebutuhan program yang disesuaikan dengan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kegiatan aksi perubahan. Dokumen SOP dirumuskan secara rinci, mencakup alur proses kerja, peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, serta mekanisme koordinasi yang harus diikuti oleh seluruh anggota tim maupun stakeholder terkait. Setelah penyusunan selesai, project leader mengajukan dokumen tersebut untuk memperoleh pengesahan resmi dari pihak berwenang sehingga memiliki legitimasi yang kuat dalam implementasinya.

 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	Nomor SOP	800/891-A/DPUPR/2025
	Tanggal Pembuatan	03 November 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	03 November 2025
Disahkan Oleh		 KEPALA DESA/LURAH dan Penataan Ruang  A. Satrio Wicaksa, S.T. NIP. 199003020194003 1 004
SUB BAGIAN PENATAAN RUANG		Judul SOP
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sumatera Selatan; 2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3); 3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 70 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 700); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.		1) Memahami teknis evaluasi pemanfaatan ruang 2) Memahami Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Teknis; 3) Mampu mengoperasikan aplikasi pengolahan data; 4) Minimal pendidikan D3/Sederajat.
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1) SOP Pemohonan Informasi Tata Ruang; 2) SOP Penyusunan Rekomendasi Tata Ruang; 3) SOP Dokumentasi & Kearsipan;		1) File Manager 2) Komputer/PC 3) ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1) Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara situasi aktual dengan apa yang tertera pada SOP ini, wajib untuk melaporkan kepada atasan untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai intruksi pimpinan		SOP ini disusun dengan rapi dalam bentuk hardcopy (tercetak) dan softcopy (digital)



Gambar 3.5 SOP Mekanisme Layanan Langsung Penataan Ruang

Dokumen yang telah disahkan kemudian didistribusikan kepada unit atau pihak terkait disertai dengan sosialisasi singkat agar seluruh anggota tim memahami ketentuan, tahapan, serta tata cara pelaksanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini menghasilkan beberapa output utama, yaitu dokumen SOP yang telah disahkan, lembar serah terima sebagai bukti distribusi dokumen kepada masing-masing pihak terkait, serta foto dokumentasi yang merekam proses sosialisasi dan distribusi. Dengan langkah ini, project leader memastikan kesiapan

dokumen pendukung sebagai landasan pelaksanaan program aksi perubahan secara efektif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Sosialisasi dan Implementasi SOP

Pada minggu ke-1 bulan November 2025, project leader dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun untuk mendukung program aksi perubahan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memiliki pemahaman yang selaras, serta mampu menerapkan prosedur secara efektif dalam setiap proses kerja di bidang penataan ruang.

Kegiatan diawali dengan penegasan kembali mengenai pengesahan dokumen SOP yang berisi pengaturan operasional, mekanisme koordinasi, dan tata alur kerja yang telah disesuaikan dengan tujuan program aksi perubahan. Setelah dokumen dinyatakan sah, project leader mendistribusikan SOP kepada pihak atau unit terkait dan memberikan penjelasan terperinci mengenai langkah-langkah implementasi, peran masing-masing pegawai, serta tanggung jawab dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Sosialisasi diselenggarakan melalui sesi diskusi dan tanya jawab untuk memastikan setiap pegawai memahami dan mampu mengimplementasikan SOP secara tepat serta konsisten.



Gambar 3.6 Sosialisasi SOP Mekanisme Layanan Langsung

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat: Jl. Letkol. Pol. H. Nuzwan No. 96-97 Telp. (0912) 521011 Fax (0912) 523499 Kayungung

BUKTI SERAH TERIMA DISTRIBUSI DOKUMEN

Dokumen : SOP Bantuan Ruang
Bidang : Bantuan Ruang

No	Nama	Bidang	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. AHMAD FAD	Bantuan Ruang	Kepala Bidang	1
2	R. R. I. K.	Bantuan Ruang	Ka. BINAAN	2
3	M. N. UMAR	-	Ka. BINAAN	3
4	A. T. A. N.	-	BENDAHARA	4
5	S. S. A. N.	Bantuan Ruang	Ka. BINAAN	5
6	S. S. A. N.	CPTA Kabupa	KASIO	6
				7
				8
				9
				10
				11
				12

Gambar 3.7 Lembar Distribusi Dokumen

Hasil dari kegiatan ini menghasilkan beberapa output yang terdokumentasi, yaitu dokumen SOP beserta formulir pendukung pelaksanaannya, lembar serah terima sebagai bukti distribusi dokumen kepada unit atau pihak terkait, serta foto dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Melalui kegiatan ini, project leader berharap seluruh pegawai

dapat menerapkan SOP dengan baik sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan program aksi perubahan secara terukur, terarah, dan berkelanjutan.

6. Pelatihan SDM secara Internal

Pada minggu ke-II bulan November 2025, dilaksanakan kegiatan pelatihan internal bagi SDM yang terlibat di Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten OKI. Tahapan awal kegiatan ini dimulai dengan pembuatan surat undangan pelatihan serta daftar hadir peserta untuk memastikan seluruh pihak yang relevan dapat mengikuti pelatihan secara resmi dan tercatat. Persiapan tersebut dilakukan sebagai langkah administratif sekaligus bentuk penegasan bahwa kegiatan pelatihan merupakan bagian penting dari rangkaian aksi perubahan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, pemahaman, dan kesiapan aparatur dalam mendukung peningkatan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan tata ruang.

PEMERINTAH KABUPATEN OKONG KONGING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kantor: Jl. Lufail, Pk. 16, Nanyan No. 1647 Telp. 0812220011 Fax 0812212200 Kumpang

UNDANGAN PELATIHAN

Sehubungan dengan surat ini, kami bermaksud untuk mengundang saudara (daftar terlampir) agar dapat mengikuti Pelatihan Teknis, Pengisian Data dan Pemahaman Peraturan Perencanaan Ruang (PUPR) Kabupaten OKI.

Waktu: 13 November 2025, Pukul 09.00 WIB dan Pukul 13.00 WIB

Tempat: Ruang Rapat Dinas PUPR Kabupaten OKI

Dengan undangan pelatihan ini kami sampaikan: dan kepada nama-nama yang terlampir, diharapkan agar dapat mengikuti kegiatan tersebut, mengikuti petunjuk kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKI.

Kumpang, 13 November 2025
Kepala Bidang Penataan Ruang

R. HIRMAN HIRMAN, S.S.
NIP. 19751212 201001 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN OKONG KONGING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kantor: Jl. Lufail, Pk. 16, Nanyan No. 1647 Telp. 0812220011 Fax 0812212200 Kumpang

DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN

No	Nama/NIP	Jabatan	Ket.
1	R. HIRMAN HIRMAN, S.S. NIP. 19751212 201001 1 007	Penata Ruang dan Mata	
2	R. HIRMAN HIRMAN, S.S. NIP. 19751212 201001 1 007	Penata Ruang dan Mata	
3	R. HIRMAN HIRMAN, S.S. NIP. 19751212 201001 1 007	Analisis Tata Ruang	
4	R. HIRMAN HIRMAN, S.S. NIP. 19751212 201001 1 007	Analisis Tata Ruang	
5	R. HIRMAN HIRMAN, S.S. NIP. 19751212 201001 1 007	Sekolah Staf	

Kumpang, 13 November 2025
Kepala Bidang Penataan Ruang

R. HIRMAN HIRMAN, S.S.
NIP. 19751212 201001 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN OKONG KONGING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kantor: Jl. Lufail, Pk. 16, Nanyan No. 1647 Telp. 0812220011 Fax 0812212200 Kumpang

DAFTAR HADIR PELATIHAN

Tema: Pelatihan Teknis, Pengisian Data dan Pemahaman Peraturan Perencanaan Ruang (PUPR) Kabupaten OKI

Waktu: 13 November 2025, Pukul 09.00 WIB

Tempat: Ruang Rapat Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten OKI

No	Nama/NIP	Tanda Tangan
1	R. HIRMAN HIRMAN, S.S. NIP. 19751212 201001 1 007	
2	R. HIRMAN HIRMAN, S.S. NIP. 19751212 201001 1 007	
3	R. HIRMAN HIRMAN, S.S. NIP. 19751212 201001 1 007	
4	R. HIRMAN HIRMAN, S.S. NIP. 19751212 201001 1 007	
5	R. HIRMAN HIRMAN, S.S. NIP. 19751212 201001 1 007	
6	R. HIRMAN HIRMAN, S.S. NIP. 19751212 201001 1 007	
7	R. HIRMAN HIRMAN, S.S. NIP. 19751212 201001 1 007	
8	R. HIRMAN HIRMAN, S.S. NIP. 19751212 201001 1 007	
9	R. HIRMAN HIRMAN, S.S. NIP. 19751212 201001 1 007	
10		
11		
12		
13		
14		

13/11/25

Gambar 3.8 Undangan dan Daftar Hadir Pelatihan



Gambar 3.9 Pelatihan SDM secara Internal

Pelatihan kemudian dilaksanakan secara langsung dengan metode penyampaian materi, diskusi, serta studi kasus sederhana yang relevan dengan proses evaluasi pemanfaatan lahan, sehingga peserta tidak hanya memahami teori namun juga mampu mengimplementasikannya pada konteks tugas sehari-hari. Melalui pelaksanaan pelatihan ini, dihasilkan beberapa dokumen pendukung berupa surat undangan pelatihan, daftar hadir, laporan hasil pelatihan, serta dokumentasi foto atau video sebagai bukti capaian milestone. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas SDM internal dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai sebelum melakukan interaksi dan fasilitasi kepada masyarakat dalam tahap implementasi kebijakan tata ruang.

7. Update Data Berbasis Cloud

Pada minggu ke-II bulan November 2025, dilakukan kegiatan update data berbasis cloud sebagai bagian dari upaya penguatan sistem informasi dan koordinasi internal dalam mendukung implementasi aksi perubahan. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan fitur Google Spreadsheet sebagai media penyimpanan dan pembaruan data secara real-time, sehingga setiap anggota tim dapat melihat perkembangan data, memberikan masukan, serta memantau hasil pekerjaan tanpa terhambat oleh lokasi dan waktu. Pemanfaatan sistem berbasis cloud ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, mempercepat proses kerja, serta menghindari adanya data yang tercecer, hilang, atau tidak sinkron antaranggota tim.



Gambar 3.10 Pemanfaatan Sistem Pengolahan Data Berbasis Cloud untuk Mendukung Aksi Perubahan

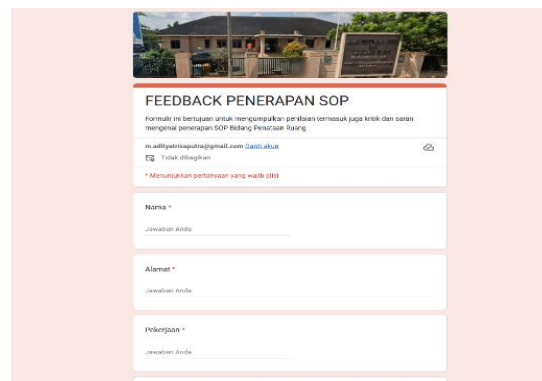
Selain itu, untuk memperkuat efektivitas komunikasi dan koordinasi, dibuat grup WhatsApp internal yang berfungsi sebagai jalur komunikasi cepat, sehingga setiap informasi, instruksi, atau update perubahan dapat tersampaikan secara langsung dan terdokumentasi dengan baik. Pada tahap ini juga dilakukan proses pengecekan ulang (updating) terhadap seluruh data yang telah terinput guna memastikan akurasi, konsistensi, serta kesesuaian antara data lapangan dan data sistem. Bukti pelaksanaan kegiatan berupa Google Spreadsheet, tangkapan layar grup WhatsApp, serta dokumentasi foto atau video disiapkan sebagai lampiran laporan dan verifikasi capaian milestone. Melalui kegiatan ini, tim diharapkan memiliki sistem komunikasi dan database yang lebih modern, terintegrasi, dan mendukung budaya kerja kolaboratif serta responsif.

8. Pengumpulan Feedback dari Setiap Stakeholder yang Terlibat

Pada minggu ke III bulan November 2025, project leader dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan kegiatan pengumpulan feedback dari para stakeholder yang terlibat dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terbaru. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi implementasi SOP untuk menilai tingkat efektivitasnya serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan penyempurnaan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bidang Penataan Ruang secara lebih optimal.

Pengumpulan feedback dilakukan dengan menggunakan formulir elektronik melalui Google Form, sehingga seluruh stakeholder dapat menyampaikan pendapat, pengalaman, dan masukan secara mudah, cepat, serta terstandar. Pertanyaan pada formulir meliputi penilaian terhadap kemudahan penerapan

SOP, hambatan atau kendala yang dirasakan selama proses pelaksanaan, serta saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas SOP. Metode ini dipilih agar diperoleh data dan perspektif yang komprehensif dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penataan ruang.

The image shows a Google Form titled "FEEDBACK PENERAPAN SOP". At the top, there is a header image of a building. Below the title, a description states: "Formulir ini bertujuan untuk mengumpulkan penilaian termasuk juga kritik dan saran mengenai penerapan SOP Bidang Perencanaan Ruang". It includes an email address "m.addyati@laporanidigital.com" and a WhatsApp icon with the text "Tidak dibagikan". A red asterisk note says "* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi". The form has three main sections: "Nama *" with a sub-label "Jawaban Anda", "Alamat *" with a sub-label "Jawaban Anda", and "Pekerjaan *" with a sub-label "Jawaban Anda". Each section has a text input field.

Gambar 3.11 Pemanfaatan Google Form untuk Mendapatkan Feedback secara Langsung

Setelah seluruh masukan terkumpul, project leader melakukan proses rekapitulasi dan analisis terhadap hasil tanggapan. Analisis tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman dan kenyamanan stakeholder terhadap SOP, sekaligus menyoroti poin-poin yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas penataan ruang. Output dari kegiatan ini meliputi tautan Google Form yang digunakan dalam pengumpulan data, rekap hasil feedback, serta foto dokumentasi kegiatan. Melalui tahapan ini, project leader berharap SOP yang diterapkan dapat lebih adaptif, responsif, dan sesuai dengan dinamika kebutuhan di lapangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

B. Manfaat Aksi Perubahan

Tabel 3.1 Manfaat Aksi Perubahan

Aspek	Sebelum Implementasi	Sesudah Implementasi
Efektivitas	- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang rendah. - Informasi terkait rencana tata ruang kurang tersampaikan sehingga aspirasi belum sepenuhnya terserap.	- Mekanisme konsultasi dan partisipasi masyarakat berjalan lebih efektif melalui sistem terstruktur. - Aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam perumusan rekomendasi penataan ruang.
Transparansi	- Informasi tata ruang tidak terpublikasi secara terbuka kepada masyarakat. - Proses pengambilan keputusan cenderung bersifat internal sehingga transparansi masih terbatas.	- Website/Google Form/Media publikasi digunakan untuk membuka akses informasi secara luas. - Masyarakat dapat melihat informasi dan perkembangan proses penataan ruang secara transparan.
Dokumentasi	- Usulan dan catatan aspirasi masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik, rawan hilang, atau tidak tersimpan secara sistematis.	- Rekap data partisipasi masyarakat terdokumentasi digital dan tersimpan dalam database online, sehingga mudah diakses dan direview.
Koordinasi Antar Bidang	- Komunikasi antara perangkat daerah, pemerintah desa, dan	- Komunikasi dan koordinasi lebih cepat melalui grup komunikasi

	masyarakat kurang komprehensif. - Proses koordinasi membutuhkan waktu lama karena pertemuan dilakukan secara konvensional.	digital (WhatsApp/Forum Diskusi Online). - Kolaborasi lintas pihak semakin terbangun dalam penyusunan rencana tata ruang.
Kinerja Pegawai	- Tingkat pemahaman masyarakat terkait tata ruang rendah. - Masyarakat hanya mengetahui pelaksanaan tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan.	- Edukasi dan sosialisasi meningkatkan wawasan serta kepedulian masyarakat. - Masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, memberikan masukan, dan turut mengawasi pelaksanaan penataan ruang.

Pelaksanaan aksi perubahan yang berfokus pada pelayanan langsung ke masyarakat telah memberikan sejumlah manfaat nyata, baik secara internal kelembagaan maupun bagi masyarakat sebagai penerima manfaat akhir. Sebelum aksi perubahan diimplementasikan, partisipasi publik dalam penyusunan rencana penataan ruang masih tergolong rendah, disebabkan oleh minimnya akses informasi, belum tersedianya sarana penyampaian aspirasi yang mudah, serta kurangnya koordinasi antara unsur pemerintah dan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penyusunan rencana tata ruang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan, kondisi, dan aspirasi wilayah setempat.

Dengan adanya aksi perubahan ini, pendekatan yang diterapkan menjadi lebih inklusif dan kolaboratif melalui penyediaan

mekanisme pelayanan secara langsung, pemanfaatan platform digital sebagai media penyampaian informasi, serta peningkatan dokumentasi aspirasi secara sistematis. Implementasi sistem berbasis digital dan prosedur yang lebih jelas telah meningkatkan efektivitas penyampaian dan penyerapan aspirasi masyarakat, sehingga rencana penataan ruang dapat disusun secara lebih partisipatif dan sesuai kebutuhan lapangan.

Selain meningkatkan efektivitas, aksi perubahan ini turut mendorong transparansi melalui keterbukaan informasi publik mengenai tahapan perencanaan tata ruang, di mana masyarakat dapat mengakses perkembangan proses perencanaan melalui dukungan media digital. Dokumentasi aspirasi kini tersusun lebih baik melalui penyimpanan data berbasis cloud, sehingga memudahkan proses pelacakan, verifikasi, serta evaluasi di masa mendatang.

Dari aspek koordinasi, program ini berhasil memperkuat komunikasi antara pemangku kepentingan melalui pemanfaatan kanal komunikasi digital, sehingga koordinasi dapat dilakukan lebih cepat dan responsif. Tidak hanya berdampak pada proses internal, aksi perubahan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai pentingnya perencanaan tata ruang, sehingga keterlibatan mereka menjadi semakin aktif dan konstruktif dalam proses penyusunan kebijakan.

Secara keseluruhan, aksi perubahan ini tidak hanya memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja organisasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui prinsip transparansi, kolaborasi, serta akuntabilitas. Ke depan, hasil dari aksi perubahan ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dalam perencanaan penataan ruang di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Guna memperkuat dukungan dari semua pihak, project leader menerapkan pendekatan persuasif untuk meningkatkan minat dan partisipasi pegawai. Misalnya, sebelum pelatihan dimulai, project leader mengadakan sesi diskusi informal bersama kepala bidang dan beberapa pegawai senior untuk menjelaskan manfaat pelatihan dan bagaimana kemampuan baru ini akan memudahkan pekerjaan harian mereka. Langkah ini terbukti berhasil dalam menarik perhatian pegawai, dan beberapa pegawai bahkan memberikan testimoni tertulis mengenai ketertarikan mereka untuk mengikuti pelatihan.

Adapun rekap hasil pelatihan dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Kebutuhan Pelatihan Bagi Pihak Terdampak

No	Pihak Terdampak	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan
1	Tim Perencanaan Bidang Penataan Ruang	Kemampuan pemahaman, prosedur dan peraturan perundangan serta pemahaman terkait tata ruang.	Pelatihan yang Diperlukan: Pelatihan Teknis dan Pemahaman Peraturan Perundangan
2	Bidang Penataan Ruang DPUPR Kab. OKI	Keterampilan koordinasi dan komunikasi antar tim dan kemampuan mengolah data yang berbasis cloud	In house Training untuk melatih Koordinasi Tim dan Pengelolaan Data.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan aksi perubahan di bidang penataan ruang, dapat diidentifikasi bahwa

terdapat dua pihak utama yang memerlukan peningkatan kompetensi guna mendukung keberhasilan aksi perubahan. Dua pihak tersebut adalah Tim Perencanaan Bidang Penataan Ruang dan Bidang Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keduanya memiliki peran penting dalam tahapan teknis maupun administratif, serta menjadi garda terdepan dalam memastikan informasi, prosedur, dan regulasi tata ruang dapat dipahami, dijalankan, dan disosialisasikan secara tepat kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Untuk Tim Perencanaan Bidang Penataan Ruang, kompetensi utama yang dibutuhkan mencakup kemampuan memahami prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata ruang. Hal ini menjadi sangat penting karena setiap tahapan perencanaan yang disusun harus sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah dan dokumen rencana lainnya. Selain itu, pemahaman teknis tentang perencanaan, penataan ruang, serta metodologi pengumpulan dan analisis data juga perlu diperkuat agar hasil perencanaan bersifat akurat, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

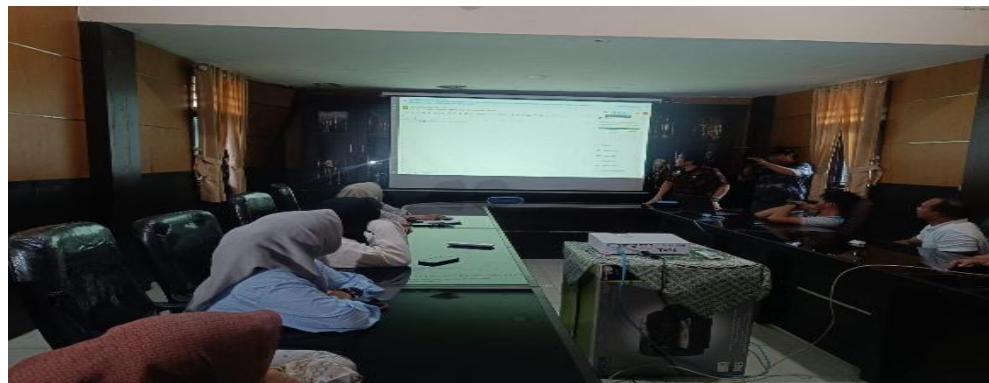
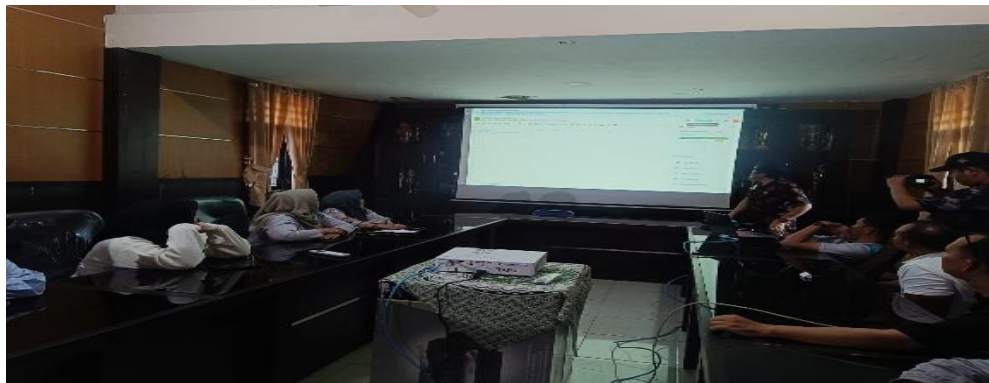
Sebagai upaya pengembangan kemampuan tersebut, diperlukan pelatihan teknis dan pemahaman regulasi yang dapat dilakukan melalui pelatihan formal, workshop, bimtek, maupun transfer knowledge melalui studi kasus atau diskusi kelompok. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tim dalam menyusun dokumen perencanaan, melakukan kajian, serta memahami proses sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan tata ruang, sehingga implementasi perencanaan dapat memberikan dampak positif yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Sementara itu, untuk Bidang Penataan Ruang DPUPR Kabupaten OKI, kompetensi yang perlu ditingkatkan berfokus pada

keterampilan koordinasi, komunikasi lintas tim, serta pengelolaan data berbasis teknologi cloud. Hal ini bertujuan agar alur komunikasi internal maupun eksternal menjadi lebih efektif dan efisien, sekaligus mendukung penyajian data yang terintegrasi, transparan, dan mudah diakses. Pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan melalui in house training yang disusun secara sistematis, meliputi pelatihan kolaborasi kerja tim, penggunaan aplikasi data berbasis digital, hingga simulasi pengelolaan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, seluruh rangkaian proses perencanaan tata ruang dapat berjalan lebih modern, responsif, dan partisipatif sesuai tuntutan era digital saat ini.



Gambar 3.13 Pelatihan Teknis, Pengolahan Data dan Pemahaman Peraturan Perundangan (Sesi 1)



Gambar 3.14 Pelatihan Komunikasi dan Koordinasi (Sesi 2)

PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMBING ILIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Alamat : Gedung PUP & Bina Desa No. 97 Telp. (072) 223551 Fax (072) 223559 Katinggung			
DAFTAR HADIR PELATIHAN			
Tema : Pelatihan Teknis, Pengisian Data dan Pemahaman Peraturan Perundangan (sesi 1)			
Waktu : 13 November 2025, Pukul 09.00 WIB			
Tempat : Ruang Rapat Bidang Penataan Ruang Dinas PUPRI Kab. OKI			
No	Nama/NIP	Tanda Tangan	
1	Bek Ruzgan, S.Eng	1	2
2	Maria Firdausy, And T	3	4
3	Bakim Satrio	5	6
4	Gungah	7	8
5	Ali Akbar	9	10
6	M. Adipati	11	12
7	NUKUL	13	14
8	Rani Junaedi, a.rod		
9	Ami		
10			
11			
12			
13			
14			

PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMBING ILIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Alamat : Gedung PUP & Bina Desa No. 97 Telp. (072) 223551 Fax (072) 223559 Katinggung			
DAFTAR HADIR PELATIHAN			
Tema : Pelatihan Komunikasi dan Koordinasi (sesi 2)			
Waktu : 13 November 2025, Pukul 13.00 WIB			
Tempat : Ruang Rapat Bidang Penataan Ruang Dinas PUPRI Kab. OKI			
No	Nama/NIP	Tanda Tangan	
1	Bek Ruzgan, S.Eng	1	2
2	Maria Firdausy, And T	3	4
3	NUF-NI	5	6
4	Rizkiyanti	7	8
5	Bakim Satrio	9	10
6	Ali Akbar	11	12
7	M. Adipati	13	14
8	Puri Junaedi, a.rod		
9	Ami		
10			
11			
12			
13			
14			

Gambar 3.15 Daftar Hadir Pelatihan Sesi 1 dan Sesi 2

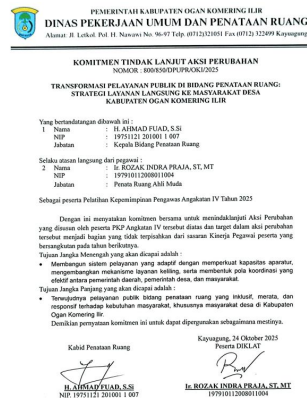
BAB IV

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

A. Tindak Lanjut Kegiatan Jangka Pendek

Pada tahap jangka pendek, kegiatan difokuskan pada upaya menghadirkan layanan penataan ruang secara langsung ke desa sebagai langkah awal untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan akses pelayanan. Tahap ini dimulai melalui konsultasi dengan mentor, pembentukan tim pelaksana, serta rapat koordinasi internal guna memastikan arah program selaras dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat desa. Legitimasi pelaksanaan diperkuat melalui penerbitan surat dukungan serta surat keputusan pembentukan tim sebagai dasar formal penyelenggaraan program layanan langsung.

Selain pembentukan dasar pelaksanaan, disusun pula dokumen pendukung berupa SOP dan instrumen kerja lainnya yang digunakan sebagai pedoman standar saat pemberian layanan. Dokumen tersebut memuat alur pelaksanaan kegiatan di desa, pembagian peran, hingga mekanisme komunikasi dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat. Setelah finalisasi, SOP disahkan oleh pihak berwenang agar memiliki kekuatan legal, dapat diterapkan secara konsisten, dan menjadi pedoman wajib bagi seluruh pelaksana layanan. Tahap jangka pendek diakhiri dengan sosialisasi SOP kepada seluruh pegawai terkait untuk menyamakan pemahaman, memperkuat komitmen, dan memastikan kesiapan teknis saat program percontohan diterapkan di desa sasaran.



Gambar 4.1 Komitmen Tindak lanjut Aksi Perubahan

B. Penetapan Target Jangka Menengah dan Jangka Panjang

1. Jangka Menengah (6 bulan s/d 1 tahun)

Pada tahap jangka menengah, tindak lanjut diarahkan untuk membangun layanan penataan ruang yang adaptif melalui penguatan kapasitas aparatur dan optimalisasi model layanan

keliling (mobile services). Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan internal yang relevan, khususnya mengenai evaluasi pemanfaatan ruang, teknik komunikasi partisipatif, serta pengolahan data berbasis digital. Kegiatan ini bertujuan memastikan aparatur mampu melayani masyarakat secara profesional, responsif, dan kompeten ketika turun langsung ke desa.

Selain peningkatan kompetensi, tahap ini juga menitikberatkan pada pengembangan sistem kerja berbasis digital menggunakan cloud data (Google Spreadsheet) serta penguatan koordinasi melalui pemanfaatan platform komunikasi seperti WhatsApp Group. Sistem digital ini memberikan kecepatan pembaruan informasi, transparansi data, serta memudahkan pemantauan kegiatan lintas wilayah. Pada tahap ini dilakukan pula evaluasi awal terhadap kualitas layanan keliling berdasarkan hasil umpan balik dari masyarakat serta pemerintah desa untuk memastikan bahwa layanan benar-benar menjawab kebutuhan dan memperluas jangkauan pelayanan publik penataan ruang.

2. Jangka Panjang (1 tahun s/d 2 tahun)

Tahap jangka panjang diarahkan pada terwujudnya pelayanan publik penataan ruang yang inklusif, merata, dan responsif bagi seluruh masyarakat desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Evaluasi menyeluruh dilakukan dengan mengumpulkan data umpan balik stakeholder menggunakan instrumen digital agar diperoleh analisis objektif mengenai efektivitas layanan langsung. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan SOP, penyesuaian kebijakan teknis, serta penyelarasan program dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan regulasi pemerintah yang terus berkembang.

Lebih jauh, tahap ini juga mencakup pengembangan sistem informasi penataan ruang berbasis digital yang komprehensif dan

terintegrasi, sehingga proses penyampaian informasi, pengendalian pemanfaatan ruang, dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara transparan dan berkelanjutan. Keberhasilan tahap jangka panjang tidak hanya diukur dari tercapainya target administrasi dan tersusunnya dokumen, tetapi dari terbentuknya budaya kerja baru yang lebih adaptif, kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik jangka panjang melalui transformasi layanan langsung ke desa.

BAB V

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

A. Rangkuman Pemilihan Mata Pelatihan Pilihan dalam Mendukung Aktualisasi Kepemimpinan PKP

Kegiatan yang dilakukan oleh project leader dalam aksi perubahan ini memiliki keterkaitan erat dengan materi-materi yang diperoleh selama pelatihan Diklat. Dengan mengintegrasikan teori yang dipelajari selama Diklat ke dalam praktik, project leader dapat mengoptimalkan implementasi perubahan ini dan memastikan keberhasilan proyek yang berkelanjutan.

Adapun rangkuman beberapa mata pelatihan yang memiliki keterkaitan erat dengan aksi perubahan ini yaitu:

Tabel 5.1 Rangkuman Mata Pelatihan Terkait dengan Aksi Perubahan

No	Judul AksiPerubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi Perubahan
1	2	3	4	5
1.	(Layanan Langsung di Desa Kab. Ogan Komering Ilir) Transformasi Pelayanan Publik Penataan Ruang	Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja	Daring	1. Konsultasi dengan Atasan: Project leader secara aktif berkonsultasi dengan mentor dan atasan untuk mendapatkan arahan, memastikan keputusan sesuai dengan visi organisasi, serta membangun hubungan yang baik melalui komunikasi dua arah yang jelas. 2. Memimpin Rapat Tim: Project leader

				mengadakan rapat untuk menyamakan persepsi dan mengajak diskusi terbuka, memastikan semua anggota tim terlibat dalam komunikasi yang konstruktif dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama. 3. Distribusi dan Penerapan SOP: Dalam mendistribusikan SOP, project leader memastikan anggota tim memahami prosedur dengan jelas, menggunakan komunikasi efektif untuk menjelaskan peran dan mengatasi hambatan dalam implementasi standar kerja.
2	(Layanan Langsung di Desa Kab. Ogan Komering Ilir) Transformasi Pelayanan Publik Penataan Ruang	Membina Kerjasama Tim	Daring	1. Memimpin Rapat Tim yang Efektif: Project leader menciptakan suasana rapat yang terbuka dan produktif, mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota, memastikan tujuan yang jelas, dan memberikan kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan masukan. Ini

				memperkuat komunikasi, membangun rasa saling percaya, dan memotivasi kolaborasi yang erat untuk mencapai tujuan bersama.
3.	(Layanan Langsung di Desa Kab. Ogan Komering Ilir) Transformasi Pelayanan Publik Penataan Ruang	Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan	Daring	1. Pemanfaatan Google Spreadsheet yang berfungsi sebagai media pembaruan data secara real-time sehingga memudahkan seluruh pihak yang terlibat dalam melihat progres kegiatan secara cepat dan akurat. 2. Grup WhatsApp dan Google Form sebagai sarana koordinasi serta pengumpulan umpan balik secara efektif, sehingga informasi yang diperlukan dapat tersampaikan secara cepat, terdokumentasi, serta memungkinkan proses evaluasi dilakukan dengan lebih sistematis.

Untuk lebih memahami adanya keterkaitan yang erat antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh project leader dalam melaksanakan aksi perubahan maka akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

B. Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja

Pada mata pelatihan “Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja”, pembelajaran yang diperoleh memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan aksi perubahan Layanan Langsung di Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik penataan ruang. Pembelajaran ini diimplementasikan melalui tiga bentuk praktik kepemimpinan komunikasi oleh project leader. Pertama, kemampuan melakukan komunikasi dan konsultasi intensif dengan atasan dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, yang menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan layanan langsung sejalan dengan visi organisasi serta dapat diterapkan secara realistis di tingkat desa. Kedua, project leader menerapkan keterampilan memimpin rapat secara efektif, tidak hanya bersifat formal, tetapi juga partisipatif dan terbuka, sehingga rapat mampu menghasilkan keputusan yang terarah terkait pelaksanaan layanan langsung, koordinasi lintas pihak, serta kesiapan teknis tim. Ketiga, pembelajaran komunikasi turut memperkuat kemampuan project leader dalam menyampaikan, mendistribusikan, serta mengimplementasikan SOP layanan langsung secara jelas kepada seluruh anggota tim dan pihak desa, sehingga setiap personel memahami peran, tanggung jawab, dan target pelayanan yang harus dicapai di lapangan.

Pembelajaran ini menegaskan bahwa komunikasi merupakan aspek fundamental dalam keberhasilan transformasi pelayanan publik penataan ruang, terutama dalam pendekatan jemput bola ke desa. Komunikasi yang baik tidak hanya menyamakan persepsi, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan keterlibatan, meningkatkan komitmen bersama, serta memperkuat koordinasi multipihak mulai dari internal dinas hingga pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, komunikasi yang efektif mampu meminimalkan kesalahpahaman teknis, mempercepat penyelesaian kendala di lapangan, serta menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan adaptif. Dengan

demikian, kompetensi komunikasi yang diperoleh dari mata pelatihan tersebut memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi program Layanan Langsung sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik penataan ruang di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

C. Membangun Kerjasama Tim

Pada mata pelatihan “Membina Kerjasama Tim”, pembelajaran yang diperoleh memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan aksi perubahan Layanan Langsung di Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik penataan ruang. Pelatihan ini memperkuat kemampuan project leader dalam mengelola tim secara kolaboratif, strategis, dan adaptif, khususnya dalam menjalankan pelayanan langsung yang membutuhkan koordinasi lintas bidang, lintas peran, serta dukungan aktif dari seluruh anggota tim. Pembelajaran ini mengajarkan pentingnya membangun suasana kerja yang kondusif dan saling menghargai, memfasilitasi komunikasi terbuka, serta memberi ruang yang seimbang bagi setiap anggota tim untuk menyampaikan ide, masukan, maupun perspektif terkait pelaksanaan layanan di tingkat desa.

Implementasi pembelajaran tersebut tercermin dalam kemampuan project leader memimpin rapat secara efektif, tidak hanya sebagai pengarah keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator diskusi yang memastikan interaksi dua arah, fokus, efisien, dan menghasilkan langkah aksi yang jelas terkait pelaksanaan layanan langsung. Melalui kompetensi ini, dinamika kerja tim dapat dikelola secara lebih profesional, termasuk dalam mengantisipasi perbedaan pendapat, meminimalkan potensi konflik, dan membangun rasa saling percaya antaranggota tim. Dengan meningkatnya partisipasi aktif serta rasa memiliki terhadap program perubahan, tim dapat bekerja secara

kooperatif, saling mendukung, dan berorientasi pada pencapaian target layanan publik penataan ruang di desa secara efektif dan berkelanjutan.

D. Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan

Kemudian, pada mata pelatihan “Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan”, hubungan pembelajaran dengan aksi perubahan tercermin melalui kemampuan project leader dalam mengintegrasikan teknologi digital sebagai instrumen utama pendukung pelaksanaan “Layanan Langsung di Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir” dalam rangka transformasi pelayanan publik penataan ruang. Implementasi Google Spreadsheet sebagai media pembaruan data berbasis cloud secara real-time menjadi langkah strategis untuk mendukung keterbukaan informasi, mempercepat kolaborasi, serta memastikan seluruh data lapangan dapat diperbaharui kapan saja tanpa batasan lokasi. Pemanfaatan media digital ini juga memungkinkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik dari internal organisasi maupun perangkat desa, untuk memantau progres kegiatan langsung secara cepat, akurat, dan transparan, termasuk dalam proses tindak lanjut atas kebutuhan pelayanan di desa.

Selain itu, optimalisasi penggunaan WhatsApp Group dan Google Form menjadi sarana komunikasi dan koordinasi yang efektif dalam mendukung pelaksanaan layanan langsung di desa. WhatsApp Group digunakan sebagai media komunikasi taktis dan on-demand untuk penyampaian informasi, arahan teknis, serta pembaruan perkembangan pelaksanaan layanan di desa secara cepat, sedangkan Google Form berfungsi untuk mengumpulkan data, aspirasi, serta masukan masyarakat desa secara lebih terstruktur dan terdokumentasi otomatis. Dengan penerapan transformasi digital ini, seluruh proses layanan — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi — dapat berjalan lebih sistematis, efisien, terukur, serta menunjukkan identitas pelayanan publik modern yang responsif dan

adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pemanfaatan teknologi digital ini diharapkan tidak hanya efektif dalam mendukung keberhasilan aksi perubahan, tetapi juga menjadi budaya kerja baru dalam penyelenggaraan pelayanan penataan ruang yang berkelanjutan dan selaras dengan tuntutan era digital.

BAB VI

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

A. Penerapan Strategi Komunikasi

1. Strategi komunikasi pada stakeholder primer dan internal

Stakeholder primer dan internal terdiri dari Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Penataan Ruang, serta Subbagian Perencanaan/Keuangan, yang berperan sebagai pengambil keputusan, pengendali kebijakan, dan penjamin ketersediaan dukungan anggaran maupun koordinasi kelembagaan. Strategi komunikasi yang diterapkan adalah formal, terjadwal, akuntabel, dan berbasis pelaporan kinerja, melalui koordinasi rutin, laporan progres pelaksanaan Layanan Langsung di Desa, penyampaian isu lapangan, serta permintaan arahan teknis. Pendekatan komunikasi dilakukan melalui metode direct instruction, konsultatif, dan kolaboratif untuk memastikan bahwa setiap keputusan, kebijakan, dan tahapan pelaksanaan selaras dengan visi transformasi pelayanan publik penataan ruang yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. Strategi komunikasi kepada stakeholder sekunder dan internal

Stakeholder sekunder internal terdiri dari Tim IT Internal Dinas serta unit pendukung administrasi (staf teknis internal) yang berfungsi sebagai tim operasional dan pengelola sistem digital layanan. Pola komunikasi yang digunakan adalah informational sharing, task-based coordination, dan integrative collaboration melalui rapat teknis, penyusunan alur kerja digital, troubleshooting, serta pemanfaatan platform berbasis teknologi seperti Google Spreadsheet, Google Form, dan WhatsApp Group. Tujuan dari strategi ini adalah memastikan sistem pendukung digital serta dokumen administrasi internal berjalan konsisten, valid, aman, dan

mampu mendukung percepatan pelayanan langsung kepada masyarakat desa secara efektif dan terintegrasi.

3. Strategi komunikasi kepada stakeholder primer dan eksternal

Stakeholder primer eksternal meliputi BAPPEDA Kabupaten OKI, Camat dan Pemerintah Desa, DPRD Kabupaten OKI, serta masyarakat desa sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap perencanaan, pengendalian, dan manfaat program. Strategi komunikasi dilakukan secara dialogis, persuasif, partisipatif, dan berbasis kolaborasi kebijakan, melalui forum group discussion, community meeting, sosialisasi lapangan, serta kanal komunikasi reflektif terkait aspirasi tata ruang. Pola komunikasi two-way interactive communication diterapkan untuk memperoleh dukungan, menyepakati rencana implementasi, menyerap aspirasi lokal, serta menghindari potensi resistensi kebijakan sehingga program dapat diterima dan dijalankan secara inklusif.

4. Strategi komunikasi kepada stakeholder sekunder dan eksternal

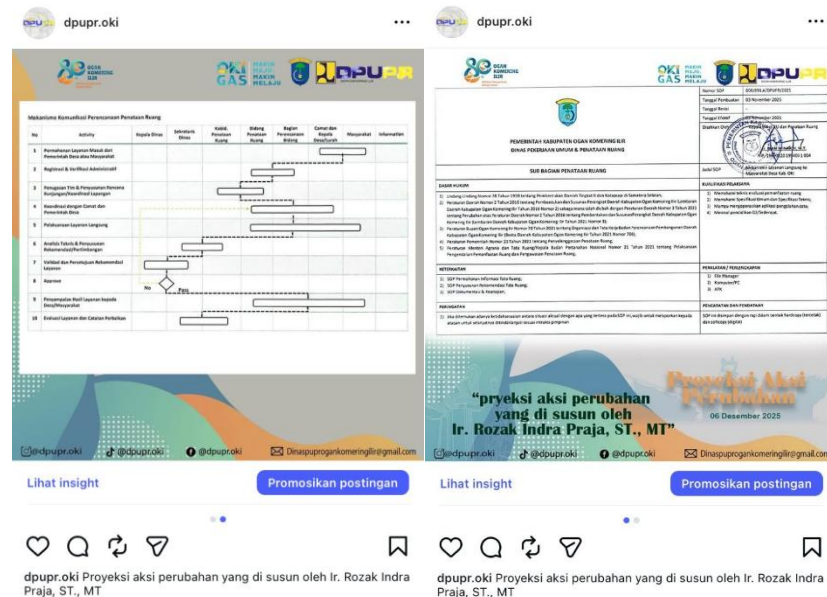
Stakeholder sekunder eksternal meliputi media, LSM, serta asosiasi profesi atau praktisi penataan ruang yang berperan dalam penguatan informasi publik dan validasi profesional terhadap substansi kebijakan. Komunikasi dilakukan melalui pendekatan informasi terbuka, edukatif, profesional, dan berbasis etika publik melalui publikasi digital, press update, rilis informasi resmi, dan peluang kolaborasi riset atau konsultatif sesuai bidang keahlian. Strategi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman publik, menghindari misinformasi, memperluas jaringan advokasi kebijakan, serta memperoleh rekomendasi berbasis keilmuan.

5. Strategi komunikasi kepada stakeholder utama dan eksternal

Stakeholder utama eksternal terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, serta kelompok masyarakat pengguna layanan yang menjadi penerima manfaat langsung di desa. Strategi komunikasi dilaksanakan melalui pendekatan kultural, empatik, persuasif, serta berbasis nilai lokal dan kearifan sosial, mengingat peran mereka sangat menentukan keberhasilan penerimaan kebijakan dan keberlanjutan program layanan. Komunikasi dilaksanakan melalui dialog komunitas, pendekatan tokoh sentral, penyampaian informasi sederhana dan mudah dipahami, serta pemetaan kebutuhan berbasis budaya lokal. Tujuan strategi ini adalah membangun kepercayaan, menguatkan legitimasi sosial, dan memastikan pelayanan publik penataan ruang benar-benar memberikan dampak manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

B. Publikasi

Publikasi aksi perubahan dilakukan melalui akun resmi Instagram Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai salah satu media informasi publik yang mudah diakses, cepat, dan memiliki jangkauan audiens yang luas. Melalui unggahan konten publikasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui bahwa sedang dilaksanakan sebuah program inovasi bertema Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Penataan Ruang, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, keterbukaan informasi, dan pelibatan warga dalam proses pembangunan wilayah. Konten yang dipublikasikan memuat pesan inti mengenai tujuan aksi perubahan, manfaat bagi masyarakat, serta ajakan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perencanaan tata ruang.



Gambar 6.1 SOP Mekanisme Layanan Langsung di Upload pada Media Sosial Dinas PUPR

Selain sebagai bentuk penyebarluasan informasi, publikasi di Instagram ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik dan dokumentasi digital resmi kegiatan. Penyampaian informasi melalui media sosial dinilai lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan pola komunikasi masyarakat saat ini yang cenderung mengakses informasi melalui perangkat digital. Dengan adanya publikasi ini, diharapkan tercipta peningkatan awareness, munculnya interaksi atau umpan balik dari masyarakat, serta terbentuknya citra positif organisasi yang modern, responsif, dan komunikatif dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Publikasi ini juga menjadi bagian dari bukti transparansi kinerja organisasi terkait upaya pemerintah dalam mewujudkan tata ruang yang partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

C. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan

Keberhasilan aksi perubahan dalam program Layanan Langsung di Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak hanya diukur

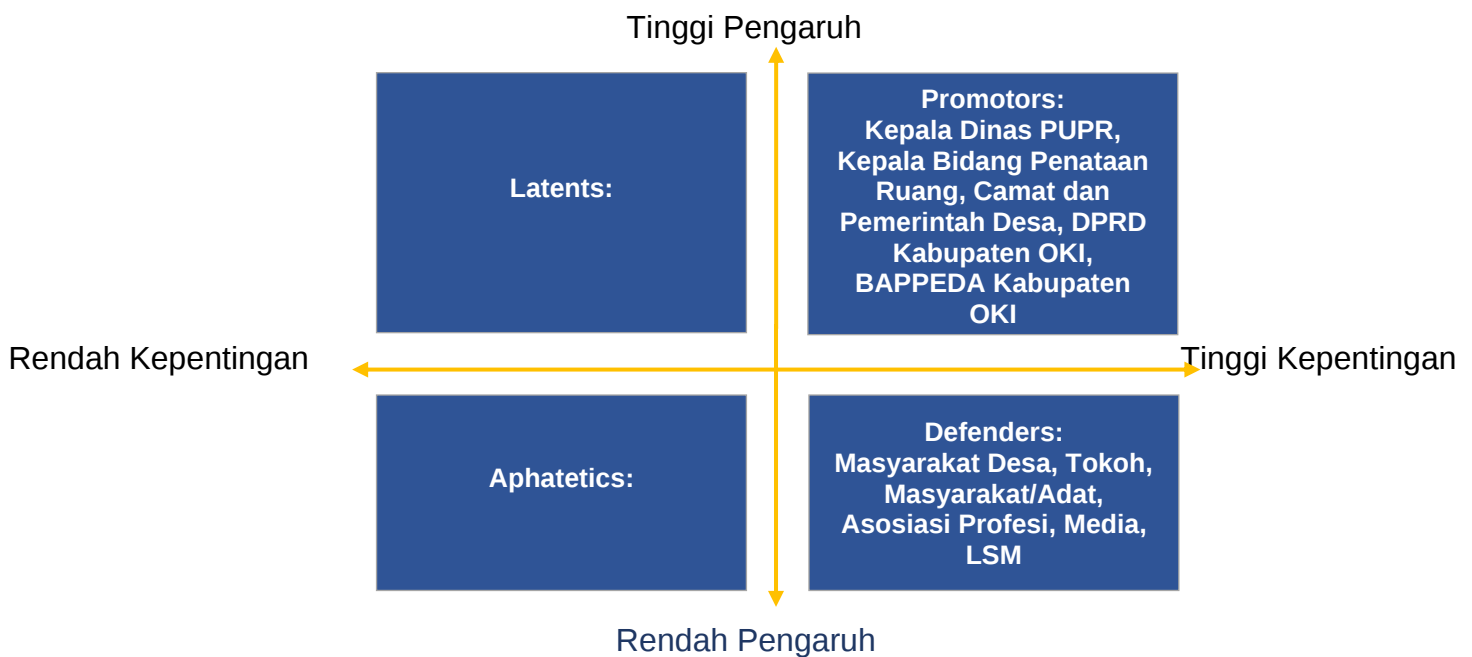
dari capaian kinerja internal organisasi, tetapi juga melalui keberhasilan memperoleh dukungan dan komitmen para stakeholder untuk melakukan adopsi maupun replikasi pelayanan. Implementasi inovasi ini dinilai memberikan manfaat strategis bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa karena menghadirkan mekanisme layanan penataan ruang yang lebih terbuka, partisipatif, terukur, serta berbasis kolaborasi langsung di tingkat lokal. Melalui forum dialog desa, rapat koordinasi lintas sektor, pemaparan hasil implementasi, serta penyampaian progres secara transparan, stakeholder menilai bahwa metode pelayanan ini mampu meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang, memperkuat kepercayaan publik, serta memperbaiki efektivitas penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat.

Dukungan terhadap adopsi dan replikasi juga muncul karena pendekatan layanan ini terbukti mudah diterapkan, efisien, dan relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan penataan ruang berbasis kewilayahan. Kemudahan penerapan prosedur, pemanfaatan teknologi digital dalam pembaruan data dan dokumentasi, mekanisme komunikasi yang terstandar, serta pelibatan masyarakat desa sebagai mitra aktif menjadikan model layanan ini dapat dikembangkan pada unit, kecamatan, maupun desa lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kesiapan stakeholder internal, eksternal, hingga kelompok masyarakat untuk melanjutkan dan memperluas implementasinya menjadi indikator bahwa aksi perubahan ini tidak hanya menghasilkan manfaat jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi sebagai model kerja berkelanjutan dalam transformasi pelayanan publik penataan ruang di daerah.

Gambaran mengenai adanya pergeseran pada peta analisa stakeholders ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 6.2 Peta Analisa Stake Holders Sebelum Kegiatan Aksi Perubahan



Gambar 6.3 Peta Analisa Stakeholders Setelah Aksi Perubahan Dilaksanakan

BAB VII

PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

A. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap tiga komponen utama, yaitu integritas, kerjasama, dan kemampuan mengelola perubahan, diperoleh gambaran bahwa Project Leader pada aksi perubahan Layanan Langsung di Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki karakter kepemimpinan yang cukup kuat dan relevan dalam mendukung transformasi pelayanan publik penataan ruang. Pemetaan ini memberikan dasar bagi perumusan strategi pengembangan diri yang berorientasi pada penguatan kualitas kepemimpinan agar mampu menjawab tantangan implementasi pelayanan di tingkat desa. Berikut adalah analisis lebih lanjut mengenai perilaku kepemimpinan Project Leader serta strategi pengembangan diri yang dapat memperkuat kualitas kepemimpinannya:

1. Integritas

a. Analisis Perilaku

Hasil penilaian menunjukkan nilai yang sama antara peserta dan mentor, yaitu 8.00, mengindikasikan bahwa Project Leader memiliki tingkat kejujuran, konsistensi sikap, dan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab. Integritas ini menjadi landasan penting dalam pelaksanaan program layanan langsung karena berkaitan dengan transparansi informasi, akuntabilitas keputusan, serta kepercayaan publik, terutama saat memberikan penjelasan mengenai rencana dan kebijakan tata ruang kepada pemerintah desa dan masyarakat.

b. Strategi Pengembangan Diri

Untuk memperkuat integritas secara berkelanjutan, Project Leader dapat meningkatkan praktik self-reflection, memperluas

akses umpan balik dari mentor maupun pemangku kepentingan, serta menerapkan evidence-based decision making. Selain itu, mengikuti pelatihan terkait etika pelayanan publik dan profesionalisme ASN dapat menjadi langkah pendukung dalam menjaga standar integritas di wilayah kerja.

2. Kerjasama

a. Analisis Perilaku

Komponen kerjasama memperoleh nilai 8.00 dari peserta dan 8.40 dari mentor, menunjukkan bahwa Project Leader memiliki kemampuan kolaboratif yang cukup baik terutama dalam mengelola kerja tim lintas unit serta berkoordinasi dengan pemerintah desa, camat, dan masyarakat sebagai mitra strategis. Hal ini terlihat melalui pelaksanaan forum diskusi desa, kolaborasi penyusunan data berbasis digital, serta implementasi SOP layanan yang membutuhkan keterlibatan aktif beberapa unit dan stakeholder eksternal.

b. Strategi Pengembangan Diri

Untuk mengoptimalkan keterampilan kolaborasi, Project Leader dapat mempelajari teknik komunikasi efektif seperti active listening, empathetic approach, dan conflict management. Pelatihan kolaborasi lintas sektoral dan stakeholder engagement juga penting untuk memperkuat kemampuan membangun jejaring strategis dan mengelola dinamika kerja kelompok.

3. Mengelola Perubahan

a. Analisis Perilaku

Pada komponen kemampuan mengelola perubahan, nilai yang diperoleh peserta dan mentor berada pada tingkat yang sama, yaitu 8.00, menunjukkan bahwa Project Leader memiliki kesiapan dan fleksibilitas yang baik dalam menghadapi dinamika

implementasi pelayanan di lapangan. Kemampuan ini tercermin melalui keberhasilan mengadaptasi penggunaan teknologi digital, menyesuaikan mekanisme pelayanan sesuai karakteristik desa, serta melakukan evaluasi cepat terhadap hasil monitoring.

b. Strategi Pengembangan Diri

Untuk memperkuat kapasitas sebagai change leader, Project Leader dapat mempelajari model manajemen perubahan seperti ADKAR, Kotter's 8 Steps, atau PDCA Cycle sebagai rujukan dalam mengelola transformasi pelayanan publik. Mengikuti pelatihan atau dialog inovasi sektor publik juga dapat memperluas perspektif dan meningkatkan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan pembangunan wilayah berbasis partisipasi masyarakat.

Tabel. 7.1 Formulir Penilaian Akhir Setelah Aksi Perubahan

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Ir. Rozak Indra Praja, ST, MT	Nama Mentor	: Ahmad Fuad, S.Si		
NIP	: 197910112008011004	NIP:	: 197511212010011007		
Jabatan	: Penata Ruang Muda	Jabatan	: Kepala Bidang Penataan Ruang		
Instansi	: DPUPR Kab. OKI	Instansi	: DPUPR Kab. OKI		
Program	: PKP IV Tahun 2025				

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	8,17	8,20	8,20	8,19	Baik
Mentor	8,17	8,40	8,20	8,26	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,17	8,34	8,20	8,24	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

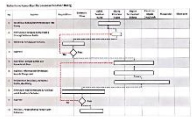
Keterangan Kualifikasi		Akhir Sikap Perilaku
9.99-10	Istimewa	8,24
7-8.99	Baik	Kualifikasi:
5-6.99	Cukup	Baik
3-4.99	Kurang	
1-2.99	Sangat Kurang	

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Sangat Kurang	

B. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Tabel 7.2 Progres Pengembangan Diri

No	Komponen/sub Komponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan / Tahapan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
				Rencana	Realisasi	
1.	Tanggung Jawab	Tingkatkan rasa kepemilikan atas tugas dan tanggung jawab individu melalui penerapan target yang jelas dan penilaian kinerja berkala.	Menerapkan SOP evaluasi pemanfaatan ruang bersama tim efektif	Minggu III Oktober 2025	Minggu III Oktober 2025	
2.	Kejujuran	Perkuat motivasi peserta dengan memperjelas tujuan jangka panjang aksi perubahan.	Menghadap pimpinan terkait Masalah yang dihadapi dan komitmen jangka panjang aksi perubahan	Minggu II November 2025	Minggu II November 2025	

3.	Konsistensi	Dorong peserta untuk menjaga rutinitas dalam mencapai target melalui pencatatan kemajuan harian atau mingguan.	Memimpin tim efektif menjalankan SOP pemanfaatan ruang	Minggu II November 2025	Minggu II November 2025	 
4.	Pengambilan Keputusan	Simulasi Pengambilan Keputusan	Melaksanakan kegiatan implementasi SOP dan menjadi pengambil keputusan dalam setiap ada kendala yang dihadapi oleh tim	Minggu II November 2025	Minggu II November 2025	
5.	Kerjasama Internal	Adakan workshop kolaboratif dan permainan tim untuk memperkuat koordinasi antar anggota tim.	Membentuk tim efektif dan menjadi pimpinan dari tim yang berkomitmen menjalankan kegiatan aksi perubahan	Minggu III November 2025	Minggu III November 2025	 
6.	Kerjasama Eksternal	Berikan pelatihan komunikasi eksternal dan negosiasi	Berkomunikasi dengan masyarakat dan kepala desa untuk	Minggu III November 2025	Minggu III November 2025	

		untuk memperkuat hubungan dengan pihak luar, seperti stakeholder dan mitra kerja.	mensosialisasikan kegiatan aksi perubahan			
7.	Komunikasi	Kembangkan kemampuan komunikasi melalui pelatihan presentasi, public speaking, dan pengelolaan konflik.	Memimpin rapat dan menjadi pemateri untuk beberapa program pelatihan	Minggu III November 2025	Minggu III November 2025	
8.	Fleksibilitas	Pelatihan Adaptasi dan Responsif	Melaksanakan instruksi dari Pimpinan Dinas PUPR untuk melakukan beberapa perbaikan dan menerapkannya pada tim efektif	Minggu III November 2025	Minggu III November 2025	

BAB VIII

PENUTUP

A. Simpulan

Aksi Perubahan yang diinisiasi melalui program “SILALA (Strategi Layanan Langsung di Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir) – Transformasi Pelayanan Publik Penataan Ruang” merupakan langkah strategis yang dirancang untuk menjawab tantangan pelayanan penataan ruang yang selama ini terhambat oleh faktor geografis, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kemampuan pemanfaatan teknologi digital di tingkat desa. Pendekatan Strategi Jemput Bola tidak hanya sekadar memindahkan ruang pelayanan ke lokasi masyarakat, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, adaptif, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat sebagai mitra utama dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah.

Melalui dukungan kepemimpinan yang berkarakter, kekuatan kolaboratif dengan stakeholder internal maupun eksternal, serta kesiapan dalam mengelola perubahan, aksi ini telah menghasilkan fondasi penting berupa SOP Layanan Keliling dan pemanfaatan sistem informasi digital yang menjadi katalis peningkatan kualitas layanan. Inovasi ini tidak hanya memberi dampak jangka pendek melalui perbaikan mekanisme pelayanan, tetapi juga menjadi momentum transformasi menuju tata kelola penataan ruang yang berorientasi pada kemitraan, keberlanjutan, dan keadilan pelayanan.

Dengan demikian, implementasi SILALA diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik, memperluas akses pelayanan, serta menjadi model inovasi yang dapat direplikasi pada program atau wilayah lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Aksi Perubahan ini sekaligus menegaskan bahwa pelayanan publik yang efektif tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kemampuan

adaptasi, keteladanan kepemimpinan, dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat secara langsung.

Penerapan mekanisme layanan langsung ke masyarakat oleh Bidang Penataan Ruang dan Dinas PUPR OKI memberikan dampak ekonomis yang signifikan bagi masyarakat maupun instansi. Dengan asumsi populasi sekitar 786 ribu jiwa atau 196 ribu rumah tangga, estimasi manfaat ekonomi bagi masyarakat berada pada kisaran Rp295 juta hingga Rp14,75 miliar per tahun dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

A. Skenario konservatif

- Partisipan = $2\% \times 196.675 \approx 3.933$ rumah tangga
- Penghematan per rumah tangga = Rp75.000/ tahun
- Total penghematan masyarakat (konservatif) = $3.933 \times 75.000 \approx \text{Rp}294.975.000 \approx \text{Rp}295 \text{ juta/tahun}$

B. Skenario moderat (dasar perencanaan yang realistis)

- Partisipan = $10\% \times 196.675 \approx 19.668$ rumah tangga
- Penghematan per rumah tangga = Rp150.000/ tahun
- Total penghematan masyarakat (moderat) = $19.668 \times 150.000 \approx \text{Rp}2.950.200.000 \approx \text{Rp}2,95 \text{ miliar/tahun}$

Sementara itu, bagi Dinas PUPR OKI, efisiensi yang tercipta melalui digitalisasi layanan, pengurangan kunjungan fisik, serta percepatan proses administrasi menghasilkan penghematan langsung antara Rp32 juta sampai Rp248 juta per tahun dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

A. Skenario konservatif

- Penghematan staf setara 0.25 FTE = Rp12.000.000/tahun
- Penghematan operasional tambahan = Rp20.000.000/tahun
- Total penghematan Dinas (konservatif) $\approx \text{Rp}32.000.000/\text{tahun}$

B. Skenario moderat

- Penghematan staf 0.5 FTE = Rp24.000.000/tahun
- Penghematan operasional = Rp75.000.000/tahun
- Total penghematan Dinas (moderat) $\approx$ Rp99.000.000/tahun (~Rp100 juta/tahun)

Note:

- *FTE (Full-Time Equivalent): 1 FTE = 1 pegawai yang bekerja penuh selama 1 tahun*

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam karya tulis ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai tindak lanjut untuk memperkuat implementasi aksi perubahan SILALA (Strategi Layanan Langsung di Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir) serta memperkuat tata kelola pelayanan publik di bidang penataan ruang:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, diharapkan terus memberikan dukungan kebijakan, regulasi, serta fasilitasi sumber daya agar model layanan jemput bola ini dapat berkembang dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten OKI juga perlu memperkuat mekanisme kolaborasi lintas sektor, mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen utama pelayanan publik, serta memastikan keberlanjutan pendanaan dalam jangka menengah dan panjang agar inovasi ini tidak berhenti pada tahap pilot project.
2. Bagi Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu dilakukan penguatan sistem manajemen data spasial berbasis digital yang terintegrasi lintas sektor dengan BAPPEDA, ATR/BPN, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi spasial akurat, komprehensif, dan dapat diakses secara real time sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain

itu, peningkatan kapasitas SDM, baik dalam aspek teknis, komunikasi publik, maupun manajemen inovasi, perlu dilakukan secara berkelanjutan agar implementasi SILALA berjalan efektif, adaptif, dan profesional.

3. Bagi ASN dan pelaksana layanan di lingkungan Dinas PUPR, perlu menanamkan budaya kerja yang berorientasi pada kolaborasi, keterbukaan informasi, dan pelayanan yang humanis. Pegawai diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai tools utama dalam menyampaikan informasi, melakukan edukasi publik, serta menangani pengaduan masyarakat. ASN juga perlu menjaga integritas, etika pelayanan, serta komitmen perubahan agar dapat menjadi role model dan motor penggerak birokrasi yang inovatif, partisipatif, dan berkeadilan.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pernyataan dukungan terhadap Aksi Perubahan



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat: Jl. Letkol. Pol. H. Nawawi No. 96-97 Telp. (0712) 321051 Fax (0712) 322499 Kayuagung

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

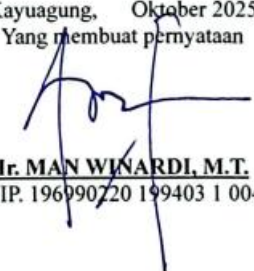
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. MAN WINARDI, M.T.
NIP : 196990220 199403 1 004
Jabatan : Kepala Dinas
Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap kegiatan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan IV Tahun 2025 yang digagas oleh Sdr. Ir. Rozak Indra Praja, S.T, M.T, Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengambil judul : **“STRATEGI LAYANAN LANGSUNG DI DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR: TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK PENATAAN RUANG”**.

Diharapkan kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam menunjang pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, Oktober 2025
Yang membuat pernyataan


Ir. MAN WINARDI, M.T.
NIP. 196990220 199403 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat: Jl. Letkol. Pol. H. Nawawi No. 96-97 Telp. (0712)321051 Fax (0712) 322499 Kayuagung

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Rifki Imanuddin Kunto, S.T., M.Si.
NIP : 19860804 200903 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap kegiatan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan IV Tahun 2025 yang digagas oleh Sdr. Ir. Rozak Indra Praja, S.T, M.T, Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengambil judul : **“STRATEGI LAYANAN LANGSUNG DI DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR: TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK PENATAAN RUANG”**.

Diharapkan kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam menunjang pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, Oktober 2025
Yang membuat pernyataan

Ir. Rifki Imanuddin Kunto, S.T., M.Si.
NIP. 19860804 200903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat: Jl. Letkol. Pol. H. Nawawi No. 96-97 Telp. (0712)321051 Fax (0712) 322499 Kayuagung

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Budiman, S.T.
NIP : 19721014 200501 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya
Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap kegiatan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan IV Tahun 2025 yang digagas oleh Sdr. Ir. Rozak Indra Praja, S.T, M.T, Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengambil judul : **“STRATEGI LAYANAN LANGSUNG DI DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR: TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK PENATAAN RUANG”**.

Diharapkan kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam menunjang pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, Oktober 2025
Yang membuat pernyataan

Ir. Budiman, S.T.
NIP. 19721014 200501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat: Jl. Letkol. Pol. H. Nawawi No. 96-97 Telp. (0712)321051 Fax (0712) 322499 Kayuagung

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD FUAD, S.Si.
NIP : 19751121 201001 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang
Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap kegiatan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan IV Tahun 2025 yang digagas oleh Sdr. Ir. Rozak Indra Praja, S.T, M.T, Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengambil judul : **“STRATEGI LAYANAN LANGSUNG DI DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR: TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK PENATAAN RUANG”**.

Diharapkan kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam menunjang pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, Oktober 2025
Yang membuat pernyataan

H. Ahmad Fuad, S.Si
NIP. 19751121 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat: Jl. Letkol. Pol. H. Nawawi No. 96-97 Telp. (0712)321051 Fax (0712) 322499 Kayuagung

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Amir Muhyiddin, ST., M.Si
NIP : 19861203 201101 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air
Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap kegiatan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan IV Tahun 2025 yang digagas oleh Sdr. Ir. Rozak Indra Praja, S.T, M.T, Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengambil judul : **“STRATEGI LAYANAN LANGSUNG DI DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR: TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK PENATAAN RUANG”**.

Diharapkan kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam menunjang pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, Oktober 2025
Yang membuat pernyataan


Ir. Amir Muhyiddin, ST., M.Si
NIP. 19861203 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat: Jl. Letkol. Pol. H. Nawawi No. 96-97 Telp. (0712)321051 Fax (0712) 322499 Kayuagung

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Apri Yanto, S.T., M.Si.
NIP : 19740426 200501 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Teknis
Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap kegiatan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan IV Tahun 2025 yang digagas oleh Sdr. Ir. Rozak Indra Praja, S.T, M.T, Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengambil judul : **“STRATEGI LAYANAN LANGSUNG DI DESA KAB. OGAN KOMERING ILIR: TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK PENATAAN RUANG”**.

Diharapkan kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam menunjang pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, Oktober 2025
Yang membuat pernyataan

Budi Apri Yanto, S.T., M.Si.
NIP. 19740-26 200501 1 007

Lampiran 2

Dokumentasi Foto Dukungan Aksi Perubahan

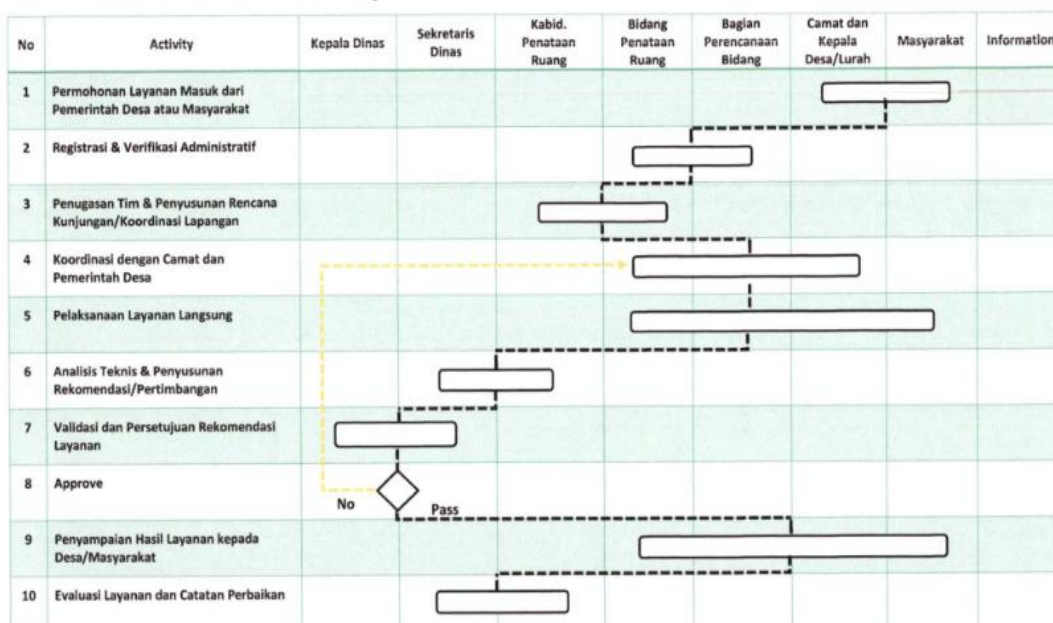


Lampiran 3

SOP Mekanisme Layanan Langsung ke Desa Kab. OKI

 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	Nomor SOP	800/891A/DPUPR/2025
	Tanggal Pembuatan	03 November 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	03 November 2025
	Disahkan Oleh	 MAN WINARDI, M.T. NIP.19680720 199403 1 004
SUB BAGIAN PENATAAN RUANG	Judul SOP	Mekanisme Layanan Langsung ke Masyarakat Desa Kab. OKI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan; 2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3); 3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 70 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 700); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.	1) Memahami teknis evaluasi pemanfaatan ruang; 2) Memahami Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Teknis; 3) Mampu mengoperasikan aplikasi pengolahan data; 4) Minimal pendidikan D3/Sederajat.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1) SOP Permohonan Informasi Tata Ruang; 2) SOP Penyusunan Rekomendasi Tata Ruang; 3) SOP Dokumentasi & Kearsipan;	1) File Manager 2) Komputer/PC 3) ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1) Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara situasi aktual dengan apa yang tertera pada SOP ini, wajib untuk melaporkan kepada atasan untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai intruksi pimpinan	SOP ini disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy (tercetak) dan softcopy (digital)	

Mekanisme Komunikasi Perencanaan Penataan Ruang



Lampiran 4

Komitmen Tindak Lanjut



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat: Jl. Letkol. Pol. H. Nawawi No. 96-97 Telp. (0712)321051 Fax (0712) 322499 Kayuagung

KOMITMEN TINDAK LANJUT AKSI PERUBAHAN
NOMOR : 800/850/DPUPR/OKI/2025

**TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENATAAN RUANG:
STRATEGI LAYANAN LANGSUNG KE MASYARAKAT DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 Nama : H. AHMAD FUAD, S.Si
NIP : 19751121 201001 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang

Selaku atasan langsung dari pegawai :

- 2 Nama : Ir. ROZAK INDRA PRAJA, ST, MT
NIP : 197910112008011004
Jabatan : Penata Ruang Ahli Muda

Sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2025

Dengan ini menyatakan komitmen bersama untuk menindaklanjuti Aksi Perubahan yang disusun oleh peserta PKP Angkatan IV tersebut diatas dan target dalam aksi perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran Kinerja Pegawai peserta yang bersangkutan pada tahun berikutnya.

Tujuan Jangka Menengah yang akan dicapai adalah :

- Membangun sistem pelayanan yang adaptif dengan memperkuat kapasitas aparatur, mengembangkan mekanisme layanan keliling, serta membentuk pola koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.

Tujuan Jangka Panjang yang akan dicapai adalah :

- Terwujudnya pelayanan publik bidang penataan ruang yang inklusif, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian pernyataan komitmen ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabid Penataan Ruang


H. AHMAD FUAD, S.Si
NIP. 19751121 201001 1 007

Kayuagung, 24 Oktober 2025
Peserta DIKLAT


Ir. ROZAK INDRA PRAJA, ST, MT
197910112008011004